

BAGIAN ANGGARAN 089



**LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019
(AUDITED)**

**PERWAKILAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
D.I YOGYAKARTA
SEBAGAI
UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

**Periode Yang Berakhir 31 Desember 2019
Tahun Anggaran 2019**

**NOMOR : LAP - 77 /PW12/1/2020
TANGGAL : 22 April 2020**

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Perwakilan BPKP D.I Yogyakarta adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan BPKP Tahun 2019 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan, sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pusat BPKP. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen untuk pengambilan keputusan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Yogyakarta, 22 April 2020

~ Kepala Perwakilan,

Slamet Tulus Wahyana
NIP

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel dan Grafik	iii
Daftar Lampiran	iv
Pernyataan Tanggung Jawab	v
Ringkasan Laporan Keuangan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
A.1. Profil dan Kebijakan Teknis	7
A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	8
A.3. Basis Akuntansi	9
A.4. Dasar Pengukuran	9
A.5. Kebijakan Akuntansi	9
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	20
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah	20
B.2. Belanja Negara	21
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	26
C.1. Aset Lancar	26
C.2. Aset Tetap	27
C.3. Aset Lainnya	33
C.4. Kewajiban Jangka Pendek	34
C.5. Ekuitas	35
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	36
D.1. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	36
D.2. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	43
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	44
E.1. Ekuitas Awal	44
E.2. Surplus/(Defisit) LO	44
E.3. Selisih Revaluasi Aset Tetap	44
E.4. Transaksi Antar Entitas	44
E.5. Ekuitas Akhir	45
F. Informasi Penting Lainnya	46
F.1. Informasi Dana Penugasan Bantuan Kedinasan	46

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1	: Rincian Estimasi dan Realisasi PNBPN Tahun 2019	20
Tabel 2	: Perbandingan Realisasi PNBPN Tahun 2019 dan 2018	21
Tabel 3	: Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Program Tahun 2019	21
Tabel 4	: Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Jenis Belanja Tahun 2019	22
Tabel 5	: Perbandingan Realisasi Belanja Tahun 2019 dan 2018	22
Tabel 6	: Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2019	23
Tabel 7	: Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2019 dan 2018	23
Tabel 8	: Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Tahun 2019	23
Tabel 9	: Perbandingan Realisasi Belanja Barang Tahun 2019 dan 2018	24
Tabel 10	: Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2019	24
Tabel 11	: Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tahun 2019 dan 2018	25
Tabel 12	: Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018	26
Tabel 13	: Rincian Persediaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018	27
Tabel 14	: Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018	27
Tabel 15	: Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2019	32
Tabel 16	: Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018	33
Tabel 17	: Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018	34
Tabel 18	: Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018	34
Tabel 19	: Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak-LO per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018	36
Tabel 20	: Rincian Beban Operasional per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018	37
Tabel 21	: Rincian Beban Pegawai per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018	38
Tabel 22	: Rincian Beban Persediaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018	39
Tabel 23	: Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018	40
Tabel 24	: Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018	41
Tabel 25	: Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018	42
Tabel 26	: Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018	402

DAFTAR LAMPIRAN

1. Laporan Keuangan Pokok
 - A. Neraca Percobaan Saldo Awal
 - B. Neraca Percobaan Kas
 - C. Neraca Percobaan Akrual
 - D. Laporan Realisasi Anggaran
 - E. Neraca
 - F. Laporan Operasional
 - G. Laporan Perubahan Ekuitas
2. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah
3. Laporan Realisasi Pengembalian Pendapatan Negara dan Hibah
4. Laporan Realisasi Anggaran Belanja
5. Laporan Realisasi Pengembalian Belanja
6. Laporan Barang Pengguna - SIMAK BMN
7. Daftar Persediaan - SIMAK BMN



BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kantor Perwakilan BPKP D.I Yogyakarta Tahun 2019 yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana terlampir, adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Yogyakarta, 22 April 2020

Kepala Perwakilan

Slamet Tulus Wahyana
NIP 19610523 198203 1 001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kantor Perwakilan BPKP D.I Yogyakarta Tahun 2019 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja Tahun 2019.

Realisasi Pendapatan Negara Tahun 2019 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp34.335.970,00. Dalam TA 2019 Perwakilan BPKP D.I Yogyakarta tidak membuat estimasi pendapatan.

Realisasi Belanja Negara Tahun 2019 adalah sebesar Rp32.809.843.210,00 atau mencapai 98,20 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp33.415.736.000,00.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas per 31 Desember 2019.

Nilai Aset per 31 Desember 2019 dicatat dan disajikan sebesar Rp100.642.392.208,00 yang terdiri atas Aset Lancar sebesar Rp108.716.057,00, Aset Tetap (netto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp100.475.322.401,00, dan Aset Lainnya (netto) Rp58.353.750,00

Nilai Kewajiban dan Ekuitas per 31 Desember 2019 masing-masing Rp134.214.263,00 dan Rp100.508.177.945,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari kegiatan operasional, surplus/defisit dari kegiatan non-operasional, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp36.416.354,00 sedangkan jumlah Beban Operasional adalah sebesar Rp33.419.941.223,00 sehingga terdapat defisit dari Kegiatan Operasional sebesar (Rp33.383.524.869,00). Kegiatan Non Operasional terjadi surplus sebesar Rp1.967.047,00, sehingga sampai

dengan 31 Desember 2019 Kantor Perwakilan BPKP D.I Yogyakarta mengalami Defisit-LO sebesar (Rp33.381.557.822,00).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2019 adalah sebesar Rp92.786.183.648,00 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp33.381.557.822,00, kemudian ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp33.099.915.119,00 dan selisih revaluasi aktiva tetap sebesar Rp8.003.637.000,00 sehingga Ekuitas Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp100.508.177.945,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2019 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PERWAKILAN BPKP D.I YOGYAKARTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018

(dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2019			31 DESEMBER TA 2018 REALISASI
		ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI THD ANGGARAN	
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	B.1				
■ Penerimaan Negara Bukan Pajak		-	34.335.970	-	35.407.842
Jumlah Pendapatan		-	34.335.970	-	35.407.842
BELANJA	B.2				
Rupiah Murni					
■ Belanja Pegawai	B.2.1	24.007.787.000	23.929.064.913	99,67	21.591.937.467
■ Belanja Barang	B.2.2	8.747.219.000	8.239.083.997	94,19	7.208.439.187
■ Belanja Modal	B.2.3	660.730.000	641.694.300	97,12	586.459.800
Jumlah Belanja		33.415.736.000	32.809.843.210	98,20	29.386.836.454

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

II. NERACA

PERWAKILAN BPKP D.I YOGYAKARTA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018

NAMA PERKIRAAN	CATATAN	31 DESEMBER 2019	31 DESEMBER 2018
ASET			
ASET LANCAR			
■ Belanja Dibayar Dimuka	C.1.1	500.000	10.600.000
■ Persediaan	C.1.2	108.216.057	162.023.760
JUMLAH ASET LANCAR		108.716.057	172.623.760
ASET TETAP			
■ Tanah	C.2.1	82.957.365.000	74.944.166.000
■ Peralatan dan Mesin	C.2.2	13.751.943.982	12.776.365.622
■ Gedung dan Bangunan	C.2.3	18.273.376.800	18.282.938.800
■ Aset Tetap Lainnya	C.2.4	141.551.981	141.551.981
■ Akumulasi Penyusutan	C.2.5	(14.648.915.363)	(13.556.996.240)
JUMLAH ASET TETAP		100.475.322.401	92.588.026.163
ASET LAINNYA			
■ Aset Tak Berwujud	C.3.1	93.366.000	93.366.000
■ Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aset Lainnya	C.3.2	(35.012.250)	(11.670.750)
JUMLAH ASET LAINNYA		58.353.750	81.695.250
JUMLAH ASET		100.642.392.208	92.842.345.173
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
■ Utang Kepada Pihak Ketiga	C.4.1	131.903.342	51.200.220
■ Pendapatan Diterima Dimuka	C.4.2	2.310.921	4.961.305
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		134.214.263	56.161.525
JUMLAH KEWAJIBAN		134.214.263	51.161.525
EKUITAS			
■ Ekuitas	C.5.1	100.508.177.945	92.786.183.648
JUMLAH EKUITAS		100.508.177.945	92.786.183.648
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		100.642.392.208	92.842.345.173

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

III. LAPORAN OPERASIONAL

**PERWAKILAN BPKP D.I YOGYAKARTA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018**

(dalam Rupiah)

NAMA PERKIRAAN	CATATAN	31 DES 2019	31 DES 2018
KEGIATAN OPERASIONAL	D.1		
PENDAPATAN OPERASIONAL	D.1.1		
■ Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1.1.1	36.416.354	38.636.569
Jumlah Pendapatan Operasional (D.1.1.1)	D.1.1		38.636.569
BEBAN OPERASIONAL	D.1.2		
■ Beban Pegawai	D.1.2.1	24.007.612.283	21.598.637.467
■ Beban Persediaan	D.1.2.2	304.028.000	251.472.872
■ Beban Barang dan Jasa	D.1.2.3	2.123.625.889	1.994.156.249
■ Beban Pemeliharaan	D.1.2.4	455.987.840	852.052.784
■ Beban Perjalanan Dinas	D.1.2.5	5.422.902.770	4.045.729.271
■ Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.1.2.6	1.105.784.441	1.112.342.574
Jumlah Beban Operasional (D.1.2.1 s.d. D.1.2.6)	D.1.2	33.419.941.223	29.854.391.217
Surplus / (Defisit) dari Kegiatan Operasional (D.1.1-D.1.2)	D.1	(33.383.524.869)	(29.815.754.648)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.2		
SURPLUS / (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA	D.2.1		
■ Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.2.1.1	3.506.967	7.843.914
■ Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.2.1.2	1.539.920	4.879.960
Jumlah Surplus / (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya (D.2.1.1- D.2.1.2)	D.2.1	1.967.047	2.963.954
Surplus / (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional (D.2.1+D.2.2)	D.2	1.967.047	2.963.954
SURPLUS / (DEFISIT) - LO (D.1+D.2)		(33.381.557.822)	(29.812.790.694)

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PERWAKILAN BPKP D.I YOGYAKARTA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018

(dalam Rupiah)

NAMA PERKIRAAN	CATATAN	31 DESEMBER 2019	31 DESEMBER 2018
EKUITAS AWAL	E.1	92.786.183.648	92.783.600.275
SURPLUS/(DEFISIT) - LO	E.2	(33.381.557.822)	(29.812.790.694)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS			
■ Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.3	8.003.637.000	-
Jumlah Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas		8.003.637.000	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	33.099.915.119	29.815.374.067
■ Ditagihkan ke Entitas Lain	E.4.1	32.809.843.210	29.386.836.454
■ Diterima dari Entitas Lain	E.4.2	(34.335.970)	(35.407.842)
■ Transfer Masuk	E.4.3	324.407.879	463.945.455
Jumlah Transaksi Antar Entitas		33.099.915.119	29.815.374.067
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS (E.2+E.3+E.4)		7.724.472.606	2.583.373
EKUITAS AKHIR (E.1+E.2+E.3+E.4+E.5)	E.5	100.508.177.945	92.786.183.648

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

Profil dan Kebijakan Teknis

A.1. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983, kemudian diperbarui dengan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Pasal 1 ayat 1, 2 dan 3 mengatur bahwa BPKP merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang berada dan bertanggung jawab kepada Presiden. Tugas BPKP adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.

Sebagai aparat pengawasan internal pemerintah, BPKP berperan untuk membantu pemerintah dalam membangun pemerintahan yang baik dan bersih, membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi dan memberikan masukan/solusi. Penegasan jati diri sebagai pengawas internal pemerintah adalah dalam arti BPKP lebih mengedepankan peran proaktif untuk dapat memberikan nilai tambah kepada *stakeholder* dan *shareholder*. Dalam hal ini, BPKP berperan untuk meningkatkan proses *governance*, manajemen risiko dan penerapan sistem pengendalian guna mencapai tujuan nasional. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, menyatakan BPKP berperan dalam mendukung akuntabilitas Presiden dalam pelaksanaan pengelolaan Keuangan Negara melalui fungsi pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Tugas dan Fungsi Perwakilan BPKP D.I Yogyakarta ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala BPKP Nomor 13 Tahun 2014.

Susunan organisasi dan pejabat pimpinan unit kerja di lingkungan Perwakilan BPKP D.I Yogyakarta adalah sebagai berikut:

- ✦ Kepala Perwakilan BPKP : Slamet Tulus Wahyana
- ✦ Kepala Bagian Tata Usaha : Risparanto
- ✦ Koordinator Pengawasan Kelompok : Bambang Kardiono
JFA Bidang Instansi Pemerintah Pusat
- ✦ Koordinator Pengawasan Kelompok : Udoyo Hari Wirawan
JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah
- ✦ Koordinator Pengawasan Kelompok : Aryanto Wibowo
JFA Bidang Akuntan Negara
- ✦ Koordinator Pengawasan Kelompok : Setiawan Wahyudiyono
JFA Bidang Investigasi
- ✦ Koordinator Pengawasan Bidang : Sunarto
Perencanaan, Pelaporan dan Pembinaan APIP

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan Keuangan*

A.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kantor Perwakilan BPKP D.I Yogyakarta per 31 Desember 2019 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Perwakilan BPKP D.I Yogyakarta. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Perwakilan BPKP D.I Yogyakarta.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan

SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis Akuntansi

A.3. BASIS AKUNTANSI

Perwakilan BPKP D.I Yogyakarta menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. DASAR PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan BPKP dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan per 31 Desember 2019 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh BPKP. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan BPKP adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan-LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Rekening Kas Umum Negara (RKUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan-LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada BPKP adalah sebagai berikut:

- Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
 - Pendapatan Sewa Aset Tetap diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan diakui pada saat ditetapkan surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang, dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTM) dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur secara handal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Tarif Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo dua belas (12) bulan setelah tanggal pelaporan disajikan sebagai Bagian Lancar Tagihan TGR.
- Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap meliputi seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.
- Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai

minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya, kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Pengembalian belanja modal tahun anggaran yang lalu dicatat sebagai koreksi terhadap nilai aset yang bersangkutan pada saat pengembalian tersebut telah disetorkan ke Kas Negara.
- Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodifikasi 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2018. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survei lapangan untuk objek penilaian selain Tanah.
- Pada tahun 2019, atas hasil penilaian kembali tahun 2017 dan 2018 terdapat perbaikan/koreksi yang dilakukan untuk penyempurnaan hasil penilaian kembali agar diperoleh nilai Aset Tetap yang lebih akurat, andal, dan wajar.
- Berdasarkan Surat Anggota BPK Nomor 50/S/IV-

XV/01/2020 tanggal 6 Januari 2020 hal Tanggapan atas Penyelesaian Tindak Lanjut Perbaikan Penilaian Kembali Barang Milik Negara Tahun 2017-2018 dinyatakan bahwa Pemerintah dapat menyajikan seluruh hasil penilaian kembali BMN tahun 2017-2018 beserta perbaikannya dalam LKPP tahun 2019 *Unaudited* sesuai mekanisme yang berlaku.

- Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurangan ekuitas pada Laporan Keuangan.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap Tanah, Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP), dan Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.

- TP adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian negara/daerah.
- TGR adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional pemerintahan, disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima Dimuka, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal

pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Pagu awal anggaran Perwakilan BPKP D.I Yogyakarta Tahun 2019 adalah sebesar Rp29.397.290.000,00 dan direvisi menjadi Rp33.415.736.000,00. Rincian pagu per Jenis Belanja adalah sebagai berikut:

Jenis Belanja		Jumlah Anggaran (Rp)	
Kode	Uraian	Awal (Rp)	Revisi (Rp)
51	Belanja Pegawai	22.285.651.000	24.007.787.000
52	Belanja Barang	6.897.639.000	8.747.219.000
53	Belanja Modal	214.000.000	660.730.000
	Total Belanja	29.397.290.000	33.415.736.000

Sedangkan apabila dilihat dari program, maka pagu belanja adalah sebagai berikut:

Uraian Program	Jumlah Pagu	
	Awal (Rp)	Revisi (Rp)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP	25.799.280.000	27.968.146.000
Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional serta Pembinaan Penyelenggaraan SPIP	3.598.010.000	5.447.590.000
Total	29.397.290.000	33.415.736.000

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

*Realisasi
Pendapatan Negara
dan Hibah
Rp34.335.970,00*

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Tahun 2019 adalah sebesar Rp34.335.970,00 dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0,00. Keseluruhan Pendapatan Negara di Perwakilan BPKP D.I Yogyakarta merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya. Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP Lainnya Tahun 2019 disajikan pada Tabel 1 berikut ini:

Tabel 1
Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP Tahun 2019

Jenis Pendapatan	Estimasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%tase
Pendapatan dari Pemanfaatan BMN	-	33.765.376	~
Pendapatan Kembali Belanja TAYL	-	570.000	~
Pendapatan Lain-lain	-	594	~
Total	-	34.335.970	~

Pendapatan Pemanfaatan BMN sebesar Rp33.765.376 merupakan pendapatan yang diperoleh dari pendapatan sewa rumah dinas sebesar Rp33.415.376,00 dan pendapatan sewa kantin sebesar Rp350.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi pendapatan Tahun 2018, terdapat penurunan realisasi pendapatan Tahun 2019 sebesar Rp1.071.872,00 atau 3,03%.

Perbandingan realisasi pendapatan Tahun 2019 dan Tahun 2018 disajikan pada Tabel 2 berikut ini:

Tabel 2
Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahun 2019 dan Tahun 2018

Jenis Belanja	Realisasi Netto (Rp)		Naik / (Turun)	
	TA 2019	TA 2018	Jumlah (Rp)	%
Pendapatan dari Pemanfaatan BMN	33.765.376	30.734.496	3.030.880	9,86
Pendapatan Kembali Belanja TAYL	570.000	4.672.920	(4.102.920)	(87,80)
Pendapatan Lain-lain	594	426	168	39,44
Total	34.335.970	35.407.842	(1.071.872)	(3,03)

B.2. Belanja Negara

Realisasi Belanja
Negara
Rp32.809.843.210,00

Realisasi belanja Perwakilan BPKP D.I Yogyakarta Tahun 2019 setelah dikurangi pengembalian belanja adalah sebesar Rp32.809.843.210,00 atau 98,20 persen dari anggaran sebesar Rp33.415.736.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja menurut program Tahun 2019 disajikan pada Tabel 3 berikut ini:

Tabel 3
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Program Tahun 2019

Program	Anggaran (Rp)	Realisasi Netto (Rp)	%
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP	27.968.146.000	27.840.944.756	99,55
Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional Serta Pembinaan Penyelenggaraan SPIP	5.447.590.000	4.968.898.454	91,25
Total	33.415.736.000	32.809.843.210	98,20

Sedangkan menurut jenis belanja, anggaran dan realisasinya disajikan pada Tabel 4 berikut ini:

Tabel 4
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Jenis Belanja
Tahun 2019

Uraian	Anggaran	Realisasi Netto
Belanja Pegawai	24.007.787.000	23.929.064.913
Belanja Barang	8.747.219.000	8.239.083.997
Belanja Modal	660.730.000	641.694.300
Total	33.415.736.000	32.809.843.210

Apabila dibandingkan dengan realisasi belanja tahun 2018, terdapat kenaikan realisasi belanja tahun 2019 sebesar Rp3.423.006.756,00 atau 11,65%. Perbandingan realisasi belanja tahun 2019 dan TA 2018 disajikan pada Tabel 5 berikut ini:

Tabel 5
Perbandingan Realisasi Belanja Tahun 2019 dan TA 2018

Jenis Belanja		Realisasi Netto (Rp)		Naik / (Turun)	
Kode	Uraian	TA 2019	TA 2018	Jumlah (Rp)	%
51	Belanja Pegawai	23.929.064.913	21.591.937.467	2.337.127.446	10,82
52	Belanja Barang	8.239.083.997	7.208.439.187	1.030.644.810	14,30
53	Belanja Modal	641.694.300	586.459.800	55.234.500	9,42
Total		32.809.843.210	29.386.836.454	3.423.006.756	11,65

B.2.1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai
Rp23.929.064.913,00

Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2019 dan TA 2018 masing-masing sebesar Rp23.929.064.913,00 dan Rp21.591.937.467,00. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Pegawai Tahun 2019 disajikan pada Tabel 6 berikut ini:

Tabel 6
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Thn 2019

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Netto (Rp)	%
Belanja Gaji dan Tunj. PNS	10.926.019.000	10.893.719.918	99,71
Belanja Lembur	245.110.000	227.935.000	92,99
Belanja Tunj. Khusus dan Belanja Pegawai Transito	12.836.658.000	12.807.409.995	99,77
Total	24.007.787.000	23.929.064.913	99,68

Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2018, terdapat kenaikan realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp2.337.127.446,00 atau 10,82% karena adanya penambahan jumlah pegawai Perwakilan BPKP D.I

Yogyakarta. Perbandingan realisasi Belanja Pegawai Tahun 2019 dan TA 2018 disajikan pada Tabel 7 berikut ini:

Tabel 7
Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai
Tahun 2019 dan TA 2018

Uraian	Realisasi Netto (Rp)		Naik / (Turun)	
	TA 2019	TA 2018	Jumlah (Rp)	%
Belanja Gaji dan Tunj. PNS	10.893.719.918	9.707.545.429	1.186.174.489	12,22
Belanja Lembur	227.935.000	159.312.000	68.623.000	43,07
Belanja Tunj. Khusus dan Belanja Pegawai Transito	12.807.409.995	11.725.080.038	1.082.329.957	9,23
Total	23.929.064.913	21.591.937.467	2.337.127.446	10,82

B.2.2. Belanja Barang

Belanja Barang
Rp8.239.083.997,00

Realisasi Belanja Barang Tahun 2019 dan TA 2018 masing-masing sebesar Rp8.239.083.997,00 dan Rp7.208.439.187,00. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Barang Tahun 2019 disajikan pada Tabel 8 berikut ini:

Tabel 8
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Tahun 2019

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Netto (Rp)	%
Belanja Barang Operasional	1.278.961.000	1.276.655.294	99,82
Belanja Barang Non Operasional	302.024.000	235.942.433	78,12
Belanja Barang Persediaan	234.150.000	233.330.600	99,65
Belanja Jasa	699.060.000	608.872.410	87,10
Belanja Pemeliharaan	461.741.000	461.380.490	99,92
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	5.771.283.000	5.422.902.770	93,96
Total	8.747.219.000	8.239.083.997	94,19

Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2018, terdapat kenaikan realisasi Belanja Barang sebesar Rp1.030.644.810,00 atau 14,30 persen karena adanya penambahan anggaran Belanja Perjalanan Dalam Negeri. Perbandingan realisasi Belanja Barang Tahun 2019 dan Tahun 2018 disajikan pada Tabel 9 berikut ini:

Tabel 9
Perbandingan Realisasi Belanja Barang
Tahun 2019 dan TA 2018

Uraian	Realisasi Netto (Rp)		Naik / (Turun)	
	Tahun 2019	Tahun 2018	Jumlah (Rp)	%
Belanja Barang Operasional	1.276.655.294	1.296.692.210	(20.036.916)	(1,55)
Belanja Barang Non Operasional	235.942.433	148.054.740	87.887.693	59,36
Belanja Barang Persediaan	233.330.600	291.558.150	(58.227.550)	(19,97)
Belanja Jasa	608.872.410	539.590.372	69.282.038	12,84
Belanja Pemeliharaan	461.380.490	886.814.444	(425.433.954)	(47,97)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	5.422.902.770	4.045.729.270	1.377.173.499	34,04
Total	8.239.083.997	7.208.439.187	1.030.644.810	14,30

Belanja Modal
Rp641.694.300,00

B.2.3. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Tahun 2019 dan Tahun 2018 sebesar Rp641.694.300,00 dan Rp586.459.800,00. Realisasi sebesar Rp641.694.300,00 dari anggaran sebesar Rp660.730.000,00 atau 97,12%. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Tahun 2019 disajikan pada Tabel 10 berikut ini:

Tabel 10
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2019

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Netto (Rp)	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	660.730.000	641.694.300	97,12
Total	660.730.000	641.694.300	97,12

Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2018, terdapat kenaikan realisasi Belanja Modal sebesar Rp55.234.500,00 atau 9,42% karena adanya kenaikan anggaran dan kebutuhan belanja modal. Perbandingan realisasi Belanja Modal Tahun 2019 dan TA 2018 disajikan pada Tabel 11 berikut ini:

Tabel 11
Perbandingan Realisasi Belanja Modal
Tahun 2019 dan TA 2018

Uraian	Realisasi Netto (Rp)		Naik / (Turun)	
	TA 2019	TA 2018	Jumlah (Rp)	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	641.694.300	14.494.000	627.200.300	4327,31
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	571.965.800	(571.965.800)	(100,00)
Total	641.694.300	586.459.800	55.234.500	9,42

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. Aset Lancar

Aset Lancar Rp
Rp108.716.057,00

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp108.716.057,00 dan Rp172.623.760,00. Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu dua belas (12) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 disajikan pada Tabel 12 berikut ini:

Tabel 12
Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

No.	Aset Lancar	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
1	Belanja dibayar dimuka	500.000	10.600.000
2	Persediaan	108.216.057	162.023.760
	Jumlah	108.716.057	172.623.760

C.1.1. Belanja Dibayar Dimuka

Belanja Dibayar
Dimuka
Rp500.000,00

Nilai Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp500.000,00 dan Rp10.600.000,00. Belanja Dibayar Dimuka merupakan sisa kupon bahan bakar minyak (BBM) per 31 Desember 2019 sebanyak 10 lembar @Rp50.000,00.

Perlakuan atas belanja kupon bensin adalah langsung diakui sebagai Beban Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin, pada akhir tahun sisa kupon bensin yang ada dicatat sebagai saldo Belanja Barang Dibayar Dimuka mengurangi Beban Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin.

C.1.3. Persediaan

Persediaan
Rp108.216.057,00

Nilai Persediaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp108.216.057,00 dan Rp162.023.760,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca, yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan tidak untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 disajikan pada Tabel 13 berikut ini:

Tabel 13
Rincian Persediaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

No	Uraian	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
1	Barang Konsumsi	68.252.540	140.469.400
2	Bahan untuk Pemeliharaan	17.345.650	2.590.000
3	Persediaan Lainnya	22.617.867	18.964.360
Jumlah		108.216.057	162.023.760

Semua jenis persediaan dalam kondisi baik.

(Rincian Persediaan disajikan pada Lampiran)

C.2. Aset Tetap

Aset Tetap
Rp100.477.800.710,00

Nilai buku Aset Tetap per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp100.477.800.710,00 dan Rp92.588.026.163,00, yang merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas (12) bulan, dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 disajikan pada Tabel 14 berikut ini:

Tabel 14
Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

No.	Uraian	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
1	Tanah	82.957.365.000	74.944.166.000
2	Peralatan dan Mesin	13.751.943.982	12.776.365.622
3	Gedung dan Bangunan	18.273.376.800	18.282.938.800
4	Aset Tetap Lainnya	141.551.981	141.551.981
Nilai Perolehan		115.124.237.763	106.145.022.403
Akumulasi Penyusutan		(14.646.437.053)	(13.556.996.240)
Nilai Buku		100.477.800.710	92.588.026.163

C.2.1. Tanah

Tanah
Rp82.957.365.000,00

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki Perwakilan BPKP D.I Yogyakarta per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing seluas 17.306 M2 senilai Rp82.957.365.000,00.

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	Rp74.944.166.000,00
Mutasi Tambah:	-
Selisih Revaluasi Aset Tetap	Rp8.013.199.000,00
Mutasi Kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2019	Rp82.957.365.000,00
Akumulasi Penyusutan	-
Nilai Buku per 31 Desember 2019	Rp82.957.365.000,00

Mutasi tambah:

Selisih Revaluasi Aset Tetap berupa tanah merupakan hasil penilaian kembali yang dilaksanakan pada semester II tahun 2017 dan hasil perbaikan/koreksi pada tahun 2019 atas hasil penilaian kembali yang dilaksanakan pada semester II tahun 2017. Total selisih Revaluasi Aset Tetap sebesar Rp8.013.199.000,00. Adapun rincian selisih Revaluasi Aset Tetap berupa tanah terdapat pada :

No	Luas	Lokasi	Selisih Nilai Revaluasi
1	4.000	Jln Parangtritis Km 5,5, Sewon, Bantul, Yogyakarta	(590.700.000)
2	251	Jln Parangtritis Km 5,5, Sewon, Bantul, Yogyakarta	(14.880.000)
3	749	Jln Parangtritis Km 5,5, Sewon, Bantul, Yogyakarta	(53.254.000)
4	2.100	Jln Parangtritis Km 5,5, Sewon, Bantul, Yogyakarta	(215.326.000)
5	1.615	Jln Babadan Baru Condongcaur, Depok, Sleman Yogyakarta	569.862.000
6	3.540	Jln Mrican Baru, Catur Tunggal, Depok Sleman, Yogyakarta	8.317.497.000
	12.255	Jumlah	8.013.199.000

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin
Rp13.751.943.982,00

Nilai perolehan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp13.751.943.982,00 dan Rp12.776.365.622,00. Sedangkan nilai buku Peralatan dan Mesin pada tanggal pelaporan sebesar Rp1.151.962.322,00 yaitu nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutannya. Dalam tahun 2019 terdapat penambahan transfer masuk Peralatan dan Mesin senilai

Rp333.884.060,00., mutasi peralatan dan mesin sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	12.776.365.622
Mutasi Tambah:	
Pembelian	641.694.300
Transfer Masuk	333.884.060
Jumlah Mutasi Tambah	975.578.360
Mutasi Kurang:	
Jumlah Mutasi Kurang	-
Nilai Perolehan per 31 Desember 2019	13.751.943.982
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2019	(12.599.981.660)
Nilai Buku per 31 Desember 2019	1.151.962.322

Rincian pembelian Peralatan dan Mesin melalui pembelian dapat dilihat dalam daftar di bawah ini:

No.	Jenis Barang	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah
				(Rp)
1	Kamera Nikon D7200	1	15.706.800	15.706.800
2	PC komputer	1	11.532.400	11.532.400
3	PC komputer	1	9.130.000	9.130.000
4	PC komputer	2	7.664.800	15.329.600
5	Printer M15A	4	1.347.500	5.390.000
6	Proyektor	5	6.380.000	31.900.000
7	AC Split 1 PK	4	7.000.000	28.000.000
8	AC Split 1,5 PK	1	11.000.000	11.000.000
9	Sound System	1	7.850.000	7.850.000
10	Sound System	1	50.500.000	50.500.000
11	Printer dan Scaner	1	8.415.000	8.415.000
12	Notebook	2	16.280.000	32.560.000
13	Kamera Udara (Drone)	1	16.800.000	16.800.000
14	Mesin pompa Diesel	1	4.750.000	4.750.000
15	Mesin potong Rumput	1	2.600.000	2.600.000
16	Vacum Cleaner	2	4.400.000	8.800.000
17	Bor Beton	2	2.450.000	4.900.000
18	Kompresor Ban	1	3.300.000	3.300.000
19	Blower Septiktank	4	3.800.000	15.200.000
20	Alat potong kertas	1	7.200.000	7.200.000
21	Coffe Maker	1	9.800.000	9.800.000
22	Televisi 60"	1	12.000.000	12.000.000
23	Tenda Lipat	2	10.600.000	21.200.000
24	Kursi Tamu	1	21.000.000	21.000.000
25	Kursi Tamu	2	22.500.000	45.000.000
26	Kursi Tamu	1	29.750.000	29.750.000

27	Layar Proyektor Besar	2	1.864.500	3.729.000
28	Layar Proyektor Kecil	1	1.540.000	1.540.000
29	Printer Mono	15	1.732.500	25.987.500
30	Printer Colour	5	2.062.500	10.312.500
31	PC Unit	5	9.707.500	48.537.500
32	Scanner	2	4.455.000	8.910.000
33	AC Cassete	2	28.650.000	57.300.000
34	Mesin Hitung	1	2.140.000	2.140.000
35	UPS	1	1.575.000	1.575.000
36	Stavol	1	1.585.000	1.585.000
37	Kursi Roda	1	1.460.000	1.460.000
38	Partisi Meja Kerja	1	22.840.000	22.840.000
39	Gazebo	1	9.280.000	9.280.000
40	Tangga	1	1.344.000	1.344.000
41	Rak Buku dan Kursi	1	4.700.000	4.700.000
42	Buku	1	1.975.000	1.975.000
43	Sepeda Kuno	1	1.280.000	1.280.000
44	Kasur Duduk	1	3.085.000	3.085.000
45	Pompa Air	1	4.500.000	4.500.000
Total				641.694.300

Sedangkan Transfer Masuk sebesar Rp333.884.060,00 terdiri dari:

- Satu unit Kendaraan Kijang Inova dari Biro Umum BPKP sebagaimana BAST No.BAST-8/SU05/03/2019 tanggal 15 April 2019 sebesar Rp290.330.000,00.
- Tiga unit Notebook dari Biro Umum BPKP sebagaimana BAST No.BAST-7/SU05/03/2019 tanggal 14 November 2019 sebesar Rp34.138.500,00.
- Dua unit IP phone dari Pusinfowas BPKP sebagaimana BAST No.BAST-1080/IP.4/2019/2019 tanggal 10 Oktober 2019 sebesar Rp9.415.560,00.

Nilai perolehan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 sebesar Rp13.751.943.982,00 tidak termasuk aset ekstrakomptabel senilai Rp52.852.991,00.

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Nilai perolehan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018, masing-masing sebesar Rp18.273.376.800,00 dan Rp18.282.938.800,00. Sedangkan nilai buku Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebesar Rp16.233.196.407,00 yaitu nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutannya.

Gedung dan Bangunan
Rp18.273.376.800,00

Uraian	Jumlah (Rp)
Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	18.282.938.800
Mutasi Tambah:	
Jumlah Mutasi Tambah	-
Mutasi Kurang:	
- Selisih Revaluasi Aset Tetap	9.562.000
Jumlah Mutasi Kurang	9.562.000
Nilai Perolehan per 31 Desember 2019	18.273.376.800
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2019	2.040.180.393
Nilai Buku per 31 Desember 2018	16.233.196.407

Mutasi Kurang:

Selisih Revaluasi Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan merupakan hasil penilaian kembali yang dilaksanakan pada semester II tahun 2017 dan hasil perbaikan/koreksi pada tahun 2019 atas hasil penilaian kembali yang dilaksanakan pada semester II tahun 2017. Total selisih Revaluasi Gedung dan Bangunan sebesar minus Rp9.562.000,00. Adapun rincian selisih Revaluasi Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan terdapat pada :

No	Uraian	Selisih Nilai Revaluasi
1	Gedung Kantor Perwakilan BPKP D.I Yogyakarta	(Rp9.562.000,00)

Aset Tetap Lainnya
Rp141.551.981,00

C.2.4. Aset Tetap Lainnya

Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp141.551.981,00. Jumlah tersebut merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan. Terdiri dari bahan perpustakaan tercetak sebesar Rp35.154.981,00 Kartografi, Naskah dan Lukisan sebesar Rp222.000,00 serta barang bercorak kesenian sebesar Rp106.175.000,00 Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	141.551.981
Mutasi Tambah	-
Mutasi Kurang	-
Nilai Perolehan per 31 Desember 2019	141.551.981
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2019	(6.275.000)
Nilai Buku per 31 Desember 2019	135.276.981

Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
Rp14.648.915.362,00

C.2.5. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp14.648.915.362,00 dan Rp13.556.996.240,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2019 disajikan pada Tabel 15.

Tabel 15
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2019

No	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1	Tanah	82.957.365.000	-	82.957.365.000
2	Peralatan dan Mesin	13.751.943.982	12.602.459.969	1.149.484.013
3	Gedung dan Bangunan	18.273.376.800	2.040.180.393	16.233.196.407
4	Aset Tetap Lainnya	141.551.981	6.275.000	135.276.981
	Jumlah	115.124.237.763	14.648.915.362	100.475.322.401

Perbandingan Mutasi Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

No	Uraian	Saldo per 31/12/2019 (Rp)	Saldo per 31/12/2018 (Rp)	Mutasi (Rp)	Beban Penyusutan (Rp)	Selisih (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	12.602.459.969	12.217.790.948	384.669.021	375.192.840	9.476.181
2	Gedung dan Bangunan	2.040.180.393	1.332.930.292	707.250.101	707.250.101	-
3	Aset Tetap Lainnya	6.275.000	6.275.000	-	-	-
	Total	14.648.915.362	13.556.996.240	1.091.919.122	1.082.442.941	9.476.181

Selisih sebesar Rp9.476.181 adalah nilai akumulasi penyusutan asset transfer masuk berupa laptop dan IP phone dari biro umum BPKP

Aset Lainnya
Rp58.353.750,00

C.3. Aset Lainnya

Nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp58.353.750,00 dan Rp81.695.250,00.

Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 disajikan pada Tabel 16 berikut ini:

Tabel 16
Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

No.	Uraian	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
1	Aset Tak Berwujud	93.366.000	93.366.000
	Nilai Perolehan	93.366.000	93.366.000
	Akumulasi Penyusutan	(35.012.250)	(11.670.750)
	Nilai Buku	58.353.750	81.695.250

Aset Tak Berwujud
Rp93.366.000,00

C.3.1 Aset Tak Berwujud

Nilai Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp93.366.000,00. Nilai sebesar Rp93.366.000,00 merupakan transfer masuk berupa *Software Ms. Office Standart* yang diperoleh dari Pusinfowas BPKP dengan Nilai Perolehan sebesar Rp93.366.000,00.

Uraian	Jumlah (Rp)
Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	93.366.000
Mutasi Tambah:	
Transfer Masuk	-
Jumlah Mutasi Tambah	-
Mutasi Kurang:	
Jumlah Mutasi Kurang	-
Nilai Perolehan per 31 Desember 2019	93.366.000

Akumulasi
Penyusutan/
Amortisasi Aset
Lainnya
Rp35.012.250,00

C.3.2 Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Nilai Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp35.012.250,00 dan Rp11.670.750,00 merupakan akumulasi penyusutan aset tak berwujud (*software*).

Kewajiban Jangka
Pendek
Rp134.288.429,00

C.4. Kewajiban Jangka Pendek

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp134.488.429,00 dan Rp56.161.525,00. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas (12) bulan setelah tanggal pelaporan yang seluruhnya merupakan Utang Kepada Pihak Ketiga. Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 disajikan pada Tabel 17 berikut ini:

Tabel 17

Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

No.	Uraian	30 Sep 2019 (Rp)	31 Des 2018 (Rp)
1	Utang Kepada Pihak Ketiga	131.903.342	51.200.220
2	Pendapatan Diterima Dimuka	2.385.087	4.961.305
	Jumlah	134.288.429	56.161.525

Utang Kepada
Pihak Ketiga
Rp131.903.342,00

C.4.1. Utang Kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp131.903.342,00 dan Rp51.200.220,00. Nilai Utang Kepada Pihak Ketiga terdiri dari:

Tabel 18

Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

No.	Uraian	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
1	Beban Listrik Kantor	45.008.569,00	42.580.770,00
2	Listrik Rumah Dinas	106.088,00	220.264,00
3	Rekening Telepon	1.444.315,00	1.413.786,00
4	Rekening Air Rumah Dinas	97.000,00	285.400,00
5	Kekurangan gaji Tahun 2019	4.859.370,00	6.700.000,00
6	Uang Makan 2019	80.388.000,00	-
	Jumlah	131.903.342,00	51.200.220

C.4.2. Pendapatan Diterima Dimuka

*Pendapatan
Diterima Dimuka
Rp2.310.921,00*

Nilai Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp2.310.921,00 dan Rp4.961.305,00. Nilai Pendapatan Diterima Dimuka terdiri dari:

No.	Uraian	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
1	Sewa Ruang ATM BRI	-	477.388
2	Sewa Ruang Koperasi	1.991.921	4.164.917
3	Sewa Ruang Kantin	319.000	319.000
	Jumlah	2.310.921	4.961.305

C.5. Ekuitas

*Ekuitas
Rp100.510.456.254,00*

Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban. Ekuitas per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp100.510.456.254,00 dan Rp92.786.183.648,00. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Surplus/(Defisit) dari
Kegiatan
Operasional
(Rp33.379.079.513,00)

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional

Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar minus Rp33.379.079.513,00 dan Rp29.812.790.694,00. Defisit sebesar Rp33.379.279.513,00 merupakan selisih antara Pendapatan Operasional sebesar Rp36.416.354,00 dikurangi dengan Beban Operasional sebesar Rp33.417.462.914,00.

Pendapatan
Operasional
Rp36.416.354,00

D.1.1. Pendapatan Operasional

Pendapatan Operasional pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp36.416.354,00 dan Rp38.636.569,00. Jumlah tersebut seluruhnya merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak.

Pendapatan Negara
Bukan Pajak-LO
Rp36.416.354,00

D.1.1.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak-LO

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak-LO pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp36.416.354,00 dan Rp38.636.569,00. Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak-LO disajikan pada Tabel 19 berikut ini:

Tabel 19
Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak-LO
31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi		Naik / (Turun)	
	31 Des 2019	31 Des 2018	Jumlah	%
Pendapatan Pemanfaatan BMN	36.415.760	38.636.143	(2.294.549)	(5,93)
Pendapatan Anggaran Lain-Lain	594	426	168	39,43
Jumlah	36.416.354	38.636.569	(2.294.381)	(5,93)

Realisasi Pendapatan Pemanfaatan BMN pada 31 Desember 2019 menurut Laporan Realisasi Anggaran dan menurut Laporan Operasional adalah sebesar Rp33.765.376,00 dan Rp36.415.760,00. Selisih sebesar Rp2.650.384,00 adalah penurunan Pendapatan Diterima Dimuka yang diakui sebagai Pendapatan tahun 2019. Pendapatan Pengelolaan BMN merupakan pendapatan yang diperoleh dari sewa rumah dinas, sewa ruang koperasi dan sewa ruang kantin.

Tabel Perbandingan Realisasi Pendapatan Operasional per
31 Desember 2019 menurut LO dan LRA:

Uraian	Realisasi		Selisih
	LO	LRA	
Pendapatan Pemanfaatan BMN	36.415.760	33.765.376	2.650.384
Penerimaan Kembali Belanja TAYL	-	570.000	(570.000)
Pendapatan Anggaran Lain-Lain	594	594	0
Jumlah	36.416.354	34.335.970	2.080.384

Beban Operasional
Rp33.417.462.914,00

D.1.2. Beban Operasional

Jumlah Beban Operasional pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp33.417.462.914,00 dan Rp29.854.391.217,00. Jumlah tersebut merupakan realisasi beban yang terjadi dalam rangka pelaksanaan kegiatan operasional selama tahun 2019.

Rincian Beban Operasional disajikan pada Tabel 20 berikut ini:

Tabel 20
Rincian Beban Operasional Tahun 2019 dan Tahun 2018

Uraian	Realisasi		Naik / (Turun)	
	Tahun 2019	Tahun 2018	Jumlah	%
Beban Pegawai	24.007.612.283	21.598.637.467	2.409.174.816	11,15
Beban Persediaan	304.028.000	251.472.872	52.555.128	20,89
Beban Barang dan Jasa	2.123.625.889	1.994.156.249	129.469.640	6,49
Beban Pemeliharaan	455.987.840	852.052.784	(396.064.944)	(46,48)
Beban Perjalanan Dinas	5.422.902.770	4.045.729.271	1.377.173.499	34,04
Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.105.784.441	1.112.342.574	(6.558.133)	0,59
Jumlah	33.417.462.914	29.854.391.217	3.565.550.006	11,94

D.1.2.1 Beban Pegawai

Beban Pegawai
Rp24.007.612.283,00

Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp24.007.612.283,00 dan Rp21.598.637.467,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang

ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan.

Rincian Beban Pegawai 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 disajikan pada Tabel 21 berikut:

Tabel 21
Rincian Beban Pegawai 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi		Naik / (Turun)	
	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Jumlah	%
Belanja Gaji Tunjangan PNS	10.972.267.288	9.714.245.429	1.258.221.859	12,95
Belanja Lembur	227.935.000	159.312.000	68.623.000	43,07
Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transit	12.807.409.995	11.725.080.038	1.082.329.957	9,23
Jumlah	24.007.612.283	21.598.637.467	2.409.174.816	11,15

Realisasi Belanja Pegawai (netto) 31 Desember 2019 menurut Laporan Realisasi Anggaran adalah sebesar Rp23.929.064.913,00 sedangkan menurut Laporan Operasional adalah sebesar Rp24.007.612.283,00. Dengan demikian terdapat selisih antara Laporan Realisasi anggaran dengan Laporan Operasional sebesar Rp78.547.370,00. Selisih tersebut adalah:

- Beban gaji tahun 2018 yang dibayarkan tahun 2019 (Rp 6.700.000)
- Beban gaji tahun 2019 yang dibayarkan tahun 2020 Rp 4.859.370
- Beban Uang Makan tahun 2019 yang dibayarkan tahun 2020 Rp 80.388.000

Tabel Perbandingan Realisasi Beban Pegawai
Tahun 2019 Menurut LO dan LRA:

Uraian	Realisasi		Selisih (Rp)
	LO (Rp)	LRA (Rp)	
Belanja Gaji Tunjangan PNS	10.972.267.288	10.893.719.918	78.547.370
Belanja Lembur	227.935.000	227.935.000	-
Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transit	12.807.409.995	12.807.409.995	-
Jumlah	24.007.612.283	23.929.064.913	78.547.370

D.1.2.2. Beban Persediaan

Beban Persediaan
Rp304.028.000,00

Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing Rp304.028.000,00 dan Rp251.472.872,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat pemakaian/konsumsi atas barang-barang yang habis pakai. Rincian Beban Persediaan disajikan pada Tabel 22 berikut ini:

Tabel 22
Rincian Beban Persediaan 31 Desember 2019
dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi		Naik / (Turun)	
	31 Des 2019	31 Des 2018	Jumlah	%
Beban Persediaan Barang Konsumsi	268.149.990	211.113.950	57.036.040	27,02
Beban Persediaan Lainnya	35.878.010	40.358.922	(4.480.912)	(11,10)
Jumlah	304.028.000	251.472.872	52.555.128	20,90

Realisasi belanja persediaan (*netto*) tahun 2019 menurut LRA sebesar Rp233.330.600,00, sedangkan menurut LO sebesar Rp304.028.000,00. Perbedaan tersebut disebabkan Belanja Persediaan dicatat sebagai perolehan persediaan di Neraca, sedangkan Beban Persediaan merupakan pemakaian persediaan selama Tahun 2019.

D.1.2.3. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan
Jasa
Rp2.123.625.889,00

Jumlah Beban Barang dan Jasa pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing Rp2.123.625.889,00 dan Rp1.994.156.249,00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa disajikan pada Tabel 23 berikut ini:

Tabel 23

Rincian Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi		Naik / (Turun)	
	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Jumlah	%
Beban Barang Operasional	1.276.655.294	1.294.553.710	(17.898.416)	(1,38)
Beban Barang Non Operasional	235.942.433	148.054.740	87.887.693	59,36
Beban Langganan Daya dan Jasa	611.028.162	551.547.799	59.480.363	10,78
Jumlah	2.123.625.889	1.994.156.249	129.469.640	6,49

Tabel Perbandingan Realisasi Beban/Belanja Barang dan Jasa

Per 31 Desember 2019 menurut LO dan LRA

Uraian	Realisasi		Selisih (Rp)
	LO (Rp)	LRA (Rp)	
Beban Barang Operasional	1.276.655.294	1.276.655.294	-
Beban Barang Non Operasional	235.942.433	235.942.433	-
Beban Langganan Daya dan Jasa	611.028.162	608.872.410	2.155.752
Total	2.123.625.889	2.121.470.137	2.155.752

Selisih realisasi Beban Barang dan Jasa sebesar Rp2.155.752,00 merupakan selisih Beban Langganan Daya dan Jasa yaitu beban tagihan rekening listrik, telepon dan air tahun 2018 yang pembayarannya dilakukan tahun 2019 dengan Beban Langganan Daya dan Jasa tahun 2019 yang dibayarkan tahun 2020.

D.1.2.4. Beban Pemeliharaan

Jumlah Beban Pemeliharaan pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing Rp455.987.840,00 dan Rp852.052.784,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap dan aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan disajikan pada Tabel 24 berikut ini:

Beban
Pemeliharaan
Rp455.987.840,00

Tabel 24
Rincian Beban Pemeliharaan
Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi		Naik / (Turun)	
	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Jumlah	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	117.374.420	442.796.398	(325.421.978)	(73,49)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	307.191.970	391.536.396	(84.344.426)	(21,54)
Beban Persediaan untuk Pemeliharaan	31.421.450	17.719.990	13.701.460	77,32
Jumlah	455.987.840	852.052.784	(396.064.944)	(46,48)

Tabel Perbandingan Realisasi Beban/Belanja Pemeliharaan
Per 31 Desember 2019 menurut LO dan LRA

Uraian	Realisasi		Selisih (Rp)
	LO (Rp)	LRA (Rp)	
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	117.374.420	117.374.420	-
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	307.191.970	297.091.970	10.100.000
Beban Persediaan untuk Pemeliharaan	31.421.450		31.421.450
Belanja Persediaan Pemeliharaan	-	46.914.100	(46.914.100)
Total	455.987.840	461.380.490	(5.392.650)

Realisasi belanja pemeliharaan (*netto*) tahun 2019 menurut LRA sebesar Rp461.380.490,00, sedangkan menurut LO sebesar Rp455.987.840,00. Perbedaan sebesar Rp5.392.650,00 merupakan :

- Selisih Saldo BBM per 31 Desember 2018 dan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp.10.600.000,00.
- Belanja bahan persediaan pemeliharaan tahun 2019 sebesar Rp46.914.100,00 digunakan sebesar Rp31.421.450,00.

D.1.2.5. Beban Perjalanan Dinas

Jumlah Beban Perjalanan Dinas pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing Rp5.422.902.770,00 dan Rp4.045.729.271,00. Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas disajikan pada Tabel 25 berikut ini:

Beban Perjalanan
Dinas
Rp5.422.902.770,00

Tabel 25

Rincian Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi		Naik / (Turun)	
	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Jumlah	%
Perjalanan Dinas Biasa	4.830.837.770	3.601.126.836	1.229.710.934	34,15
Perjalanan Dinas Dalam Kota	272.675.000	160.580.000	112.095.000	69,81
Perjalanan Dinas Meeting Dalam Kota	129.330.000	172.870.000	(43.540.000)	(25,19)
Perjalanan Dinas Meeting Luar Kota	190.060.000	111.152.435	78.907.565	70,99
Jumlah	5.422.902.770	4.045.729.271	1.377.173.499	34,04

Beban Penyusutan dan Amortisasi
Rp1.105.784.441,00

D.1.2.6. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing Rp1.105.784.441,00 dan Rp1.112.342.574,00. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi disajikan pada Tabel 25 berikut ini:

Tabel 26

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi		Naik / (Turun)	
	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Jumlah	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	375.192.840	257.363.505	117.829.335	45,78
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	707.250.101	843.308.319	(136.058.218)	(16,13)
Beban Penyusutan Aset Tak Berwujud	23.341.500	11.670.750	11.670.750	100,00
Jumlah	1.105.784.441	1.112.342.574	(6.558.133)	(0,58)

Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional
Rp1.967.047,00

D.2. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional

Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp1.967.047,00 dan Rp2.963.954,00. Jumlah tersebut merupakan Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya.

Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
Rp1.967.047,00

D.2.1. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya.

Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp1.967.047,00 dan Rp2.963.954,00.

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
Rp3.506.967,00

D.2.1.1. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp3.506.967,00 dan Rp7.843.914,00.

Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
Rp1.539.920,00

D.2.1.2. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp1.539.920,00 dan Rp4.879.960,00. Rincian Pendapatan dan Beban dari Kegiatan Non Operasional dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Uraian	Realisasi		Naik / (Turun)	
	31 Des 2019	31 Des 2018	Jumlah	%
Penerimaan Kembali Belanja Tahun Yang Lalu	570.000	4.672.920	(4.102.920)	(87,80)
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	2.936.967	3.170.994	(234.027)	(7,38)
Sub Jumlah Pendapatan	3.506.967	7.843.914	(4.336.947)	(55,29)
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	1.539.920	4.879.960	(3.340.040)	(68,44)
Jumlah	1.967.047	2.963.954	(996.907)	(33,63)

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp92.786.183.648,00

E.1. Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp92.786.183.648,00 dan Rp92.783.600.275,00.

Surplus/(Defisit) LO
(Rp33.379.079.513,00)

E.2. Surplus/(Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar minus Rp33.381.557.822,00 dan Rp29.812.790.694,00. Defisit LO merupakan selisih kurang pendapatan dibandingkan dengan beban operasional atau defisit yang berasal dari kegiatan operasional sebagaimana telah dijelaskan pada Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional.

Selisih Revaluasi Aset Tetap
Rp8.003.637.000,00

E.3. Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk tahun 2019 merupakan selisih yang muncul atas koreksi/perbaikan terhadap hasil penilaian kembali Aset Tetap.

Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk menjadi periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp8.003.637.000,00 dan Rp0,00. Selisih Revaluasi Aset Tetap tersebut dari dari penilaian atas Tanah dan Gedung dan Bangunan.

Transaksi Antar Entitas
Rp33.099.915.119,00

E.4. Transaksi Antar Entitas

Jumlah Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp33.099.915.119,00 dan Rp29.815.374.067,00. Jumlah tersebut terdiri atas:

Uraian	30 September 2019	30 September 2018
Ditagihkan ke Entitas Lain	32.809.843.210	29.386.836.454
Diterima dari Entitas Lain	(34.335.970)	(35.407.842)
Transfer Masuk	324.407.879	463.945.455
Jumlah	33.099.915.119	29.815.374.067

Ditagihkan ke Entitas Lain
Rp32.809.843.210,00

E.4.1. Ditagihkan ke Entitas Lain

Jumlah Ditagihkan ke Entitas Lain per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp32.809.843.210,00 dan Rp29.386.836.454,00. Jumlah tersebut merupakan realisasi

belanja yang telah diterima pembayarannya dari Kas Negara pada tanggal neraca

*Diterima dari
Entitas Lain
(Rp34.335.970,00)*

E.4.2. Diterima dari Entitas Lain

Jumlah Diterima dari Entitas Lain per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar minus Rp34.335.970,00 dan minus Rp35.407.842,00.

Jumlah tersebut merupakan realisasi penerimaan negara yang telah disetorkan ke Kas Negara pada tanggal neraca berupa Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan Rp33.765.376,00, Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Yang Lalu (Pengembalian kelebihan pembayaran tunjangan fungsional) Rp570.000,00 dan lain-lain Rp594,00.

*Transfer Masuk
Aset Tetap
Rp324.407.879,00*

E.4.3 Transfer Masuk Aset Tetap

Jumlah Transfer Masuk per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp324.407.879,00 dan Rp463.945.455,00.

Jumlah tersebut merupakan transfer masuk berupa satu unit Kijang Inova dan tiga unit Laptop dari Biro Umum BPKP dan dua unit IP Phone dari Pusinfowas BPKP.

*Ekuitas Akhir
Rp100.510.382.088,00*

E.5. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas per tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp100.508.177.945,00 dan Rp92.786.183.648,00. Nilai tersebut merupakan kekayaan bersih pada tanggal neraca yaitu selisih antara nilai Aset dikurangi nilai Kewajiban.

*Pengungkapan
Penting Lainnya*

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1. Informasi Dana Penugasan Bantuan Kedinasan

Sampai dengan Tahun 2019 kegiatan pengawasan seluruhnya didanai dari DIPA Perwakilan BPKP D.I Yogyakarta.

**NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2019
(DALAM RUPIAH)**

Kode Laporan: NPSAIKT
Tanggal : 19-05-20
Halaman : 1

KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA : 089 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)
ESELON I : 01 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
WILAYAH/PROPINSI : 0400 DI YOGYAKARTA
SATUAN KERJA : 450536 PERWAKILAN BPKP D.I. YOGYAKARTA

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0	115612	Piutang dari KPPN	605,892,790	
0	219711	Utang Kepada KUN	34,335,970	
2	511111	Allotment Belanja Gaji Pokok PNS		7,813,294,000
2	511119	Allotment Belanja Pembulatan Gaji PNS		110,000
2	511121	Allotment Belanja Tunj. Suami/Istri PNS		561,800,000
2	511122	Allotment Belanja Tunj. Anak PNS		170,858,000
2	511123	Allotment Belanja Tunj. Struktural PNS		86,820,000
2	511124	Allotment Belanja Tunj. Fungsional PNS		1,030,190,000
2	511125	Allotment Belanja Tunj. PPh PNS		57,300,000
2	511126	Allotment Belanja Tunj. Beras PNS		335,887,000
2	511129	Allotment Belanja Uang Makan PNS		802,860,000
2	511151	Allotment Belanja Tunjangan Umum PNS		66,900,000
2	512211	Allotment Belanja Uang Lembur		245,110,000
2	512411	Allotment Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)		12,836,658,000
2	521111	Allotment Belanja Keperluan Perkantoran		1,034,803,000
2	521114	Allotment Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat		20,500,000
2	521115	Allotment Belanja Honor Operasional Satuan Kerja		193,920,000
2	521119	Allotment Belanja Barang Operasional Lainnya		29,738,000
2	521211	Allotment Belanja Bahan		227,704,000
2	521213	Allotment Belanja Honor Output Kegiatan		60,520,000
2	521219	Allotment Belanja Barang Non Operasional Lainnya		13,800,000
2	521811	Allotment Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi		194,150,000
2	521832	Allotment Belanja Barang Persediaan Lainnya		40,000,000
2	522111	Allotment Belanja Langganan Listrik		454,400,000
2	522112	Allotment Belanja Langganan Telepon		49,600,000
2	522113	Allotment Belanja Langganan Air		4,040,000
2	522141	Allotment Belanja Sewa		163,500,000
2	522151	Allotment Belanja Jasa Profesi		27,520,000
2	523111	Allotment Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan		117,405,000
2	523112	Allotment Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan		46,998,000
2	523121	Allotment Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		297,338,000
2	524111	Allotment Belanja Perjalanan Biasa		4,999,616,000
2	524113	Allotment Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		315,822,000

**NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2019
(DALAM RUPIAH)**

Kode Laporan: NPSAIKT
Tanggal : 19-05-20
Halaman : 2

KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA : 089 **BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)**
ESELON I : 01 **BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN**
WILAYAH/PROPINSI : 0400 **DI YOGYAKARTA**
SATUAN KERJA : 450536 **PERWAKILAN BPKP D.I. YOGYAKARTA**

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
2	524114	Allotment Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota		185,370,000
2	524119	Allotment Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota		270,475,000
2	532111	Allotment Belanja Modal Peralatan dan Mesin		660,730,000
3	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan		33,765,376
3	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu		570,000
3	425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain		594
3	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	7,812,661,100	
3	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	108,505	
3	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS		9,868
3	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	561,178,130	
3	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	168,480,444	
3	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	85,820,000	
3	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1,021,490,000	
3	511124	Pengembalian Belanja Tunj. Fungsional PNS		800,000
3	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	56,814,907	
3	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	334,190,700	
3	511129	Belanja Uang Makan PNS	788,066,000	
3	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	65,905,000	
3	511151	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS		185,000
3	512211	Belanja Uang Lembur	227,935,000	
3	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	12,807,409,995	
3	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	1,034,740,314	
3	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	18,259,980	
3	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	193,920,000	
3	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	29,735,000	
3	521211	Belanja Bahan	162,182,433	
3	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	60,060,000	
3	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	13,700,000	
3	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	193,330,600	
3	521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya	40,000,000	
3	522111	Belanja Langganan Listrik	454,307,088	
3	522112	Belanja Langganan Telepon	49,588,716	
3	522113	Belanja Langganan Air	3,990,610	

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2019
(DALAM RUPIAH)

Kode Laporan: NPSAIKT
Tanggal : 19-05-20
Halaman : 3

KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA : 089 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)
ESELON I : 01 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
WILAYAH/PROPINSI : 0400 DI YOGYAKARTA
SATUAN KERJA : 450536 PERWAKILAN BPKP D.I. YOGYAKARTA

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3	522141	Belanja Sewa	83,885,996	
3	522151	Belanja Jasa Profesi	17,100,000	
3	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	117,374,420	
3	523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	46,914,100	
3	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	297,091,970	
3	524111	Belanja Perjalanan Biasa	4,831,598,770	
3	524111	Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa		761,000
3	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	273,800,000	
3	524113	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		1,125,000
3	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	129,330,000	
3	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	190,060,000	
3	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	641,694,300	
		J U M L A H	33,452,952,838	33,452,952,838

**LAPORAN OPERASIONAL
 TINGKAT SATUAN KERJA**
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 Desember 2019 DAN 2018
 (DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 089 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)
 UNIT ORGANISASI : 01 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
 WILAYAH/PROPINSI : 0400 DI YOGYAKARTA
 SATUAN KERJA : 450536 PERWAKILAN BPKP D.I. YOGYAKARTA

JENIS KEWENANGAN : KD KANTOR DAERAH

URAIAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2019	2018	Jumlah	%
1	2	3	4	5
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN PERPAJAKAN				
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	0.00
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	0.00
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	0.00
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	0.00
Pendapatan Cukai	0	0	0	0.00
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	0.00
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	0.00
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	0.00
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0.00
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK				
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0.00
Pendapatan Dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND)	0	0	0	0.00
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	36,416,354	38,636,569	(2,220,215)	(5.74)
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	36,416,354	38,636,569	(2,220,215)	(5.74)
PENDAPATAN HIBAH				
Pendapatan Hibah	0	0	0	0.00
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	0.00
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL	36,416,354	38,636,569	(2,220,215)	(5.74)
BEBAN OPERASIONAL				
Beban Pegawai	24,007,612,283	21,598,637,467	2,408,974,816	11.15
Beban Persediaan	304,028,000	251,472,872	52,555,128	20.89
Beban Barang dan Jasa	2,123,625,889	1,994,156,249	129,469,640	6.49
Beban Pemeliharaan	455,987,840	852,052,784	(396,064,944)	(46.48)
Beban Perjalanan Dinas	5,422,902,770	4,045,729,271	1,377,173,499	34.04
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	0.00
Beban Bunga	0	0	0	0.00
Beban Subsidi	0	0	0	0.00
Beban Hibah	0	0	0	0.00
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	0.00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	1,105,784,441	1,112,342,574	(6,558,133)	(0.58)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	0.00
Beban Transfer	0	0	0	0.00
Beban Lain-Lain	0	0	0	0.00

**LAPORAN OPERASIONAL
 TINGKAT SATUAN KERJA**
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 Desember 2019 DAN 2018
 (DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 089 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)
 UNIT ORGANISASI : 01 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
 WILAYAH/PROPINSI : 0400 DI YOGYAKARTA
 SATUAN KERJA : 450536 PERWAKILAN BPKP D.I. YOGYAKARTA

JENIS KEWENANGAN : KD KANTOR DAERAH

URAIAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2019	2018	Jumlah	%
1	2	3	4	5
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL	33,419,941,223	29,854,391,217	3,565,550,006	11.94
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(33,383,524,869)	(29,815,754,648)	(3,567,770,221)	(11.96)
KEGIATAN NON OPERASIONAL				
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR				
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	0.00
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	0.00
Jumlah Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	0.00
SURPLUS/(DEFISIT) PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG				
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0.00
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0.00
Jumlah Surplus/(defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0.00
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA				
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	3,506,967	7,843,914	(4,336,947)	(55.29)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	1,539,920	4,879,960	(3,340,040)	(68.44)
Jumlah Surplus/(defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	1,967,047	2,963,954	(996,907)	(33.63)
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	1,967,047	2,963,954	(996,907)	(33.63)
POS LUAR BIASA				
Beban Luar Biasa	0	0	0	0.00
SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA	0	0	0	0.00
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(33,381,557,822)	(29,812,790,694)	(3,568,767,128)	(11.97)

Yogyakarta, 31 Desember 2019
 Kepala Perwakilan

 Slamet Tulus Wahyana
 NIP. 196105231982031001



**LAPORAN OPERASIONAL
 TINGKAT SATUAN KERJA**
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 Desember 2019 DAN 2018
 (DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 089 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)
 UNIT ORGANISASI : 01 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
 WILAYAH/PROPINSI : 0400 DI YOGYAKARTA
 SATUAN KERJA : 450536 PERWAKILAN BPKP D.I. YOGYAKARTA

JENIS KEWENANGAN : KD KANTOR DAERAH

URAIAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2019	2018	Jumlah	%
1	2	3	4	5
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN PERPAJAKAN				
Pendapatan Pajak Penghasilan				
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah				
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan				
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan				
Pendapatan Cukai				
Pendapatan Pajak Lainnya				
Pendapatan Bea Masuk				
Pendapatan Bea Keluar				
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0.00
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK				
Pendapatan Sumber Daya Alam				
Pendapatan Dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND)				
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya				
425131 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	36,415,760	38,636,143	(2,220,383)	(5.74)
425999 Pendapatan Anggaran Lain-lain	594	426	168	39.43
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	36,416,354	38,636,569	(2,220,215)	(5.74)
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	36,416,354	38,636,569	(2,220,215)	(5.74)
PENDAPATAN HIBAH				
Pendapatan Hibah				
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	0.00
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL	36,416,354	38,636,569	(2,220,215)	(5.74)
BEBAN OPERASIONAL				
Beban Pegawai				
511111 Beban Gaji Pokok PNS	7,816,953,100	6,830,050,900	986,902,200	14.44
511119 Beban Pembulatan Gaji PNS	99,467	88,430	11,037	12.48
511121 Beban Tunj. Suami/Istri PNS	561,548,230	481,002,440	80,545,790	16.74
511122 Beban Tunj. Anak PNS	168,590,148	154,205,972	14,384,176	9.32
511123 Beban Tunj. Struktural PNS	85,820,000	79,320,000	6,500,000	8.19
511124 Beban Tunj. Fungsional PNS	1,013,990,000	927,690,000	86,300,000	9.30
511125 Beban Tunj. PPh PNS	56,891,643	37,620,807	19,270,836	51.22
511126 Beban Tunj. Beras PNS	334,190,700	307,991,880	26,198,820	8.50
511129 Beban Uang Makan PNS	868,454,000	825,630,000	42,824,000	5.18
511151 Beban Tunjangan Umum PNS	65,730,000	70,645,000	(4,915,000)	(6.95)
512211 Beban Uang Lembur	227,935,000	159,312,000	68,623,000	43.07

**LAPORAN OPERASIONAL
 TINGKAT SATUAN KERJA**
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 Desember 2019 DAN 2018
 (DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 089 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)
 UNIT ORGANISASI : 01 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
 WILAYAH/PROPINSI : 0400 DI YOGYAKARTA
 SATUAN KERJA : 450536 PERWAKILAN BPKP D.I. YOGYAKARTA

JENIS KEWENANGAN : KD KANTOR DAERAH

URAIAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2019	2018	Jumlah	%
1	2	3	4	5
512411 Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	12,807,409,995	11,725,080,038	1,082,329,957	9.23
Jumlah Beban Pegawai	24,007,612,283	21,598,637,467	2,408,974,816	11.15
Beban Persediaan				
593111 Beban Persediaan konsumsi	268,149,990	211,113,950	57,036,040	27.01
593149 Beban persediaan lainnya	35,878,010	40,358,922	(4,480,912)	(11.10)
Jumlah Beban Persediaan	304,028,000	251,472,872	52,555,128	20.89
Beban Barang dan Jasa				
521111 Beban Keperluan Perkantoran	1,034,740,314	1,019,059,475	15,680,839	1.53
521113 Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	0	10,497,275	(10,497,275)	(100.00)
521114 Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	18,259,980	19,441,960	(1,181,980)	(6.07)
521115 Beban Honor Operasional Satuan Kerja	193,920,000	194,980,000	(1,060,000)	(0.54)
521119 Beban Barang Operasional Lainnya	29,735,000	50,575,000	(20,840,000)	(41.20)
521211 Beban Bahan	162,182,433	61,474,740	100,707,693	163.81
521213 Beban Honor Output Kegiatan	60,060,000	71,580,000	(11,520,000)	(16.09)
521219 Beban Barang Non Operasional Lainnya	13,700,000	15,000,000	(1,300,000)	(8.66)
522111 Beban Langganan Listrik	456,620,711	412,745,069	43,875,642	10.63
522112 Beban Langganan Telepon	49,619,245	26,924,254	22,694,991	84.29
522113 Beban Langganan Air	3,802,210	3,318,300	483,910	14.58
522141 Beban Sewa	83,885,996	74,760,176	9,125,820	12.20
522151 Beban Jasa Profesi	17,100,000	33,800,000	(16,700,000)	(49.40)
Jumlah Beban Barang dan Jasa	2,123,625,889	1,994,156,249	129,469,640	6.49
Beban Pemeliharaan				
523111 Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	117,374,420	442,796,398	(325,421,978)	(73.49)
523121 Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	307,191,970	391,536,396	(84,344,426)	(21.54)
593113 Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	31,421,450	17,719,990	13,701,460	77.32
Jumlah Beban Pemeliharaan	455,987,840	852,052,784	(396,064,944)	(46.48)
Beban Perjalanan Dinas				
524111 Beban Perjalanan Biasa	4,830,837,770	3,601,126,836	1,229,710,934	34.14
524113 Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	272,675,000	160,580,000	112,095,000	69.80
524114 Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	129,330,000	172,870,000	(43,540,000)	(25.18)
524119 Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	190,060,000	111,152,435	78,907,565	70.99
Jumlah Beban Perjalanan Dinas	5,422,902,770	4,045,729,271	1,377,173,499	34.04
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat				
Beban Bunga				
Beban Subsidi				
Beban Hibah				
Beban Bantuan Sosial				

**LAPORAN OPERASIONAL
 TINGKAT SATUAN KERJA**
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 Desember 2019 DAN 2018
 (DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 089 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)
 UNIT ORGANISASI : 01 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
 WILAYAH/PROPINSI : 0400 DI YOGYAKARTA
 SATUAN KERJA : 450536 PERWAKILAN BPKP D.I. YOGYAKARTA

JENIS KEWENANGAN : KD KANTOR DAERAH

URAIAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2019	2018	Jumlah	%
1	2	3	4	5
Beban Penyusutan dan Amortisasi				
591111 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	375,192,840	257,363,505	117,829,335	45.78
591211 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	707,250,101	843,308,319	(136,058,218)	(16.13)
592115 Beban Amortisasi Software	23,341,500	11,670,750	11,670,750	100.00
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	1,105,784,441	1,112,342,574	(6,558,133)	(0.58)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih				
Beban Transfer				
Beban Lain-Lain				
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL	33,419,941,223	29,854,391,217	3,565,550,006	11.94
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(33,383,524,869)	(29,815,754,648)	(3,567,770,221)	(11.96)
KEGIATAN NON OPERASIONAL				
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR				
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar				
Beban Pelepasan Aset Non Lancar				
Jumlah Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	0.00
SURPLUS/(DEFISIT) PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG				
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang				
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang				
Jumlah Surplus/(defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0.00
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA				
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya				
425911 Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	570,000	2,082,920	(1,512,920)	(72.63)
425912 Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	2,590,000	(2,590,000)	(100.00)
491511 Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	2,936,967	3,170,994	(234,027)	(7.38)
Jumlah Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	3,506,967	7,843,914	(4,336,947)	(55.29)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya				
593311 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	1,539,920	4,879,960	(3,340,040)	(68.44)
Jumlah Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	1,539,920	4,879,960	(3,340,040)	(68.44)
Jumlah Surplus/(defisit) Dari Kegiatan Non	1,967,047	2,963,954	(996,907)	(33.63)

**LAPORAN OPERASIONAL
 TINGKAT SATUAN KERJA**
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 Desember 2019 DAN 2018
 (DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 089 **BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)**
UNIT ORGANISASI : 01 **BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN**
WILAYAH/PROPINSI : 0400 **DI YOGYAKARTA**
SATUAN KERJA : 450536 **PERWAKILAN BPKP D.I. YOGYAKARTA**

JENIS KEWENANGAN : KD **KANTOR DAERAH**

URAIAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2019	2018	Jumlah	%
1	2	3	4	5
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	1,967,047	2,963,954	(996,907)	(33.63)
POS LUAR BIASA				
Beban Luar Biasa				
SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA	0	0	0	0.00
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(33,381,557,822)	(29,812,790,694)	(3,568,767,128)	(11.97)

Yogyakarta, 31 Desember 2019
 Kepala Perwakilan

 Slamet Tulus Wahyana
 NIP. 19610623 198203 1 001



**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 TINGKAT SATUAN KERJA**
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
 (DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 089 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)
 UNIT ORGANISASI : 01 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
 WILAYAH/PROPINSI : 0400 DI YOGYAKARTA
 SATUAN KERJA : 450536 PERWAKILAN BPKP D.I. YOGYAKARTA

JENIS KEWENANGAN : KD KANTOR DAERAH

URAIAN	JUMLAH		Kenalkan (Penurunan)	
	31 DESEMBER 2019	31 DESEMBER 2018	Jumlah	%
1	2	3	4	5
EKUITAS AWAL	92,786,183,648	92,783,600,275	2,583,373	0.00
SURPLUS/DEFISIT - LO	(33,381,557,822)	(29,812,790,694)	(3,568,767,128)	11.97
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	8,003,637,000	0	8,003,637,000	0.00
Penyesuaian Nilai Aset	0	0	0	0.00
Koreksi Nilai Persediaan	0	0	0	0.00
Koreksi Atas Reklasifikasi	0	0	0	0.00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	8,003,637,000	0	8,003,637,000	0.00
Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi	0	0	0	0.00
Koreksi Lain-lain	0	0	0	0.00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	33,099,915,119	29,815,374,067	3,284,541,052	11.01
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	7,721,994,297	2,583,373	7,719,410,924	298,811.31
EKUITAS AKHIR	100,508,177,945	92,786,183,648	7,721,994,297	8.32

Yogyakarta, 31 Desember 2019

Kepala Perwakilan

Slamet Julius Wahyana

NIP. 19610523 198203 1 004



**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 TINGKAT SATUAN KERJA**

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
 (DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 089 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)
 UNIT ORGANISASI : 01 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
 WILAYAH/PROPINSI : 0400 DI YOGYAKARTA
 SATUAN KERJA : 450536 PERWAKILAN BPKP D.I. YOGYAKARTA

JENIS KEWENANGAN : KD KANTOR DAERAH

URAIAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	31 DESEMBER 2019	31 DESEMBER 2018	Jumlah	%
1	2	3	4	5
EKUITAS AWAL	92,786,183,648	92,783,600,275	2,583,373	0.00
SURPLUS/DEFISIT - LO	(33,381,557,822)	(29,812,790,694)	(3,568,767,128)	11.97
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	8,003,637,000	0	8,003,637,000	0.00
Penyesuaian Nilai Aset	0	0	0	0.00
391117 Penyesuaian Nilai Persediaan	0	0	0	0.00
Koreksi Nilai Persediaan	0	0	0	0.00
391113 Koreksi Nilai Persediaan	0	0	0	0.00
Koreksi Atas Reklasifikasi	0	0	0	0.00
391151 Koreksi Atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	0	0	0	0.00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	8,003,637,000	0	8,003,637,000	0.00
391114 Revaluasi Aset Tetap	8,003,637,000	0	8,003,637,000	0.00
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0	0	0	0.00
391116 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0	0	0	0.00
391118 Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	0	0	0	0.00
Koreksi Lain-lain	0	0	0	0.00
391119 Koreksi Lainnya	0	0	0	0.00
391121 Ekuitas Transaksi Lainnya	0	0	0	0.00
311312 Pengembalian Pendapatan BLU Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0	0.00
311313 SAL Selisih Kurs Belum Terealisasi	0	0	0	0.00
311315 Penyesuaian SAL BLU	0	0	0	0.00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	33,099,915,119	29,815,374,067	3,284,541,052	11.01
313111 Ditagihkan Ke Entitas Lain	32,809,843,210	29,386,836,454	3,423,006,756	11.64
313121 Diterima Dari Entitas Lain	(34,335,970)	(35,407,842)	1,071,872	(3.02)
313211 Transfer Keluar	0	0	0	0.00
313221 Transfer Masuk	324,407,879	463,945,455	(139,537,576)	(30.07)
313231 Transaksi Pengelolaan Investasi BA BUN pada BLU	0	0	0	0.00
391131 Pengesahan Hibah Langsung	0	0	0	0.00
391132 Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	0	0	0	0.00
391133 Pengesahan Hibah Langsung TAYL	0	0	0	0.00
391141 Setoran Surplus BLU	0	0	0	0.00
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	7,721,994,297	2,583,373	7,719,410,924	298,811.31
EKUITAS AKHIR	100,508,177,945	92,786,183,648	7,721,994,297	8.32

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA**
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 089 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)
UNIT ORGANISASI : 01 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
WILAYAH/PROPINSI : 0400 DI YOGYAKARTA
SATUAN KERJA : 450536 PERWAKILAN BPKP D.I. YOGYAKARTA

JENIS KEWENANGAN : KD KANTOR DAERAH

URAIAN	JUMLAH		Kenalkan (Penurunan)	
	31 DESEMBER 2019	31 DESEMBER 2018	Jumlah	%
1	2	3	4	5

Yogyakarta, 31 Desember 2019
Kepala Perwakilan

Slamet Tulus Wahyana
NIP. 196105231982031001



NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(DALAM RUPIAH)

Kode Laporan: NSAIE1T
Tanggal : 22/04/20
Halaman : 1

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 089 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)
UNIT ORGANISASI : 01 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
WILAYAH/PROPINSI : 0400 DI YOGYAKARTA
SATUAN KERJA : 450536 PERWAKILAN BPKP D.I. YOGYAKARTA

JENIS KEWENANGAN : KD KANTOR DAERAH

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2019	2018	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	500,000	10,600,000	(10,100,000)	(95.28)
Persediaan	108,216,057	162,023,760	(53,807,703)	(33.20)
JUMLAH ASET LANCAR	108,716,057	172,623,760	(63,907,703)	(37.02)
ASET TETAP				
Tanah	82,957,365,000	74,944,166,000	8,013,199,000	10.69
Peralatan dan Mesin	13,751,943,982	12,776,365,622	975,578,360	7.63
Gedung dan Bangunan	18,273,376,800	18,282,938,800	(9,562,000)	(0.05)
Aset Tetap Lainnya	141,551,981	141,551,981	0	0.00
Akumulasi Penyusutan	(14,648,915,362)	(13,556,996,240)	(1,091,919,122)	8.05
JUMLAH ASET TETAP	100,475,322,401	92,588,026,163	7,887,296,238	8.51
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	93,366,000	93,366,000	0	0.00
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	(35,012,250)	(11,670,750)	(23,341,500)	200.00
JUMLAH ASET LAINNYA	58,353,750	81,695,250	(23,341,500)	(28.57)
JUMLAH ASET	100,642,392,208	92,842,345,173	7,800,047,035	8.40
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	131,903,342	51,200,220	80,703,122	157.62
Pendapatan Diterima Dimuka	2,310,921	4,961,305	(2,650,384)	(53.42)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	134,214,263	56,161,525	78,052,738	138.97
JUMLAH KEWAJIBAN	134,214,263	56,161,525	78,052,738	138.97
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	100,508,177,945	92,786,183,648	7,721,994,297	8.32
JUMLAH EKUITAS	100,508,177,945	92,786,183,648	7,721,994,297	8.32

**NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(DALAM RUPIAH)**

Kode Laporan: NSAIE1T
Tanggal : 22/04/20
Halaman : 2

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 089 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)
UNIT ORGANISASI : 01 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
WILAYAH/PROPINSI : 0400 DI YOGYAKARTA
SATUAN KERJA : 450536 PERWAKILAN BPKP D.I. YOGYAKARTA

JENIS KEWENANGAN : KD KANTOR DAERAH

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2019	2018	Jumlah	%
1	2	3	4	5
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	100,642,392,208	92,842,345,173	7,800,047,035	8.40

Yogyakarta, 31 Desember 2019

Kepala Perwakilan



Slamet Tulus Wahyana
NIP. 19610523 198203 1 001

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 089
ESELON I : 01
WILAYAH/PROVINSI : 0400
SATUAN KERJA : 450536
JENIS KEWENANGAN : KD

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
DI YOGYAKARTA
PERWAKILAN BPKP D.I. YOGYAKARTA
KANTOR DAERAH

Kode Lap. : LRAST
Tanggal : Rabu, 22 April 2020
Halaman : 1
Prog.id : lu_pashtk

No	URAIAN	2019					2018				
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REAL. ANGG.	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REAL. ANGG.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH										
A.1.1	PENERIMAAN NEGARA	0	34,335,970	34,335,970	0.00	0	35,407,842	35,407,842	0.00		
A.1.1.a	Penerimaan Perpajakan	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00		
A.1.1.b	Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	34,335,970	34,335,970	0.00	0	35,407,842	35,407,842	0.00		
A.1.2	HIBAH	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00		
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	0	34,335,970	34,335,970	0.00	0	35,407,842	35,407,842	0.00		
B	BELANJA NEGARA										
B.1.1	Rupiah Murni	33,415,736,000	32,809,843,210	(605,892,790)	98.19	30,057,329,000	29,386,836,454	(670,492,546)	97.77		
B.1.1.a	Belanja Pegawai	24,007,787,000	23,929,064,913	(78,722,087)	99.67	21,678,493,000	21,591,937,467	(86,555,533)	99.60		
B.1.1.b	Belanja Barang	8,747,219,000	8,239,083,997	(508,135,003)	94.19	7,757,131,000	7,208,439,187	(548,691,813)	92.93		
B.1.1.c	Belanja Modal	660,730,000	641,694,300	(19,035,700)	97.12	621,705,000	586,459,800	(35,245,200)	94.33		
B.1.1.d	Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00		
B.1.1.e	Subsidi	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00		
B.1.1.f	Hibah	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00		
B.1.1.g	Bantuan Sosial	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00		
B.1.1.h	Belanja Lain-lain	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00		
B.1.2	Pinjaman dan Hibah	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00		
B.1.2.a	Belanja Pegawai	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00		
B.1.2.b	Belanja Barang	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00		
B.1.2.c	Belanja Modal	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00		
B.1.2.d	Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00		
B.1.2.e	Subsidi	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00		
B.1.2.f	Hibah	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00		
B.1.2.g	Bantuan Sosial	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00		
B.1.2.h	Belanja Lain-lain	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00		
	JUMLAH BELANJA	33,415,736,000	32,809,843,210	(605,892,790)	98.19	30,057,329,000	29,386,836,454	(670,492,546)	97.77		
C	PEMBIAYAAN										
C.1	PEMBIAYAAN DALAM NEGERI (NETO)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00		

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 089 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)
 ESELON I : 01 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
 WILAYAH/PROPINSI : 0400 DI YOGYAKARTA
 SATUAN KERJA : 450536 PERWAKILAN BPKP D.I. YOGYAKARTA
 JENIS KEMENANGAN : KD KANTOR DAERAH

Kode Lap. : LRAST
 Tanggal : Rabu, 22 April 2020
 Halaman : 2
 Prog Id : lu_pastkt

No	URAIAN	2019				2018			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REAL- ANGG.	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REAL- ANGG.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
C.I.1	Perbankan Dalam Negeri	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
C.I.2	Non Perbankan Dalam Negeri (Neto)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
C.II	PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (NETO)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
C.II.1	Penarikan Pinjaman Luar Negeri	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
C.II.1	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
JUMLAH PEMBIAYAAN		0	0	0	0.00	0	0	0	0.00

Yogyakarta, 31 Desember 2019

Kepala Perwakilan

Slamet Tulus Wahyana
NIP. 19610523 198203 1 001

DAFTAR TRANSAKSI TRANSFER KELUAR / TRANSFER MASUK
 PERIODE 01 JANUARI S.D. 31 DESEMBER 2019

KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA : 089 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)
 ESELON I : 01 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
 WILAYAH/PROPINSI : 0400 DI YOGYAKARTA
 SATUAN KERJA : 450536 PERWAKILAN BPKP D.I. YOGYAKARTA

TGL DOKUMEN	KODE TRANSAKSI	KODE AKUN	URAIAN AKUN	DEBIT	KREDIT	SATKER INTRACO
1	2	3	4	5	6	
30-06-19	102	132111	Peralatan dan Mesin	290,330,000	0	089010199450491007KP
30-06-19	102	313221	Transfer Masuk	0	290,330,000	089010199450491007KP
31-12-19	102	132111	Peralatan dan Mesin	34,138,500	0	089010199450491007KP
31-12-19	102	313221	Transfer Masuk	0	34,138,500	089010199450491007KP
31-12-19	102	132111	Peralatan dan Mesin	9,415,560	0	089010199636778000KP
31-12-19	102	313221	Transfer Masuk	0	9,415,560	089010199636778000KP
31-12-19	102	313221	Transfer Masuk	8,534,625	0	089010199450491007KP
31-12-19	102	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	8,534,625	089010199450491007KP
31-12-19	102	313221	Transfer Masuk	941,556	0	089010199636778000KP
31-12-19	102	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	941,556	089010199636778000KP

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
TAHUN 2019
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 089
ESELON I : 01
WILAYAH/PROVINSI : 0400
SATUAN KERJA : 450536
JENIS SATUAN KERJA : KD

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
DI YOGYAKARTA
PERWAKILAN BPKP D.I. YOGYAKARTA
KANTOR DAERAH

Kode Lap. : LRBST 01
Tanggal : Rabu, 22 April 2020
Halaman : 1
Prog.Id : lu_rabstkt

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				TAHUN INI	JUMLAH S/D TAHUN INI	PENGEMBALIAN S/D TAHUN INI	JUMLAH NETO S/D TAHUN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	TRANSAKSI KAS								
0	RUPIAH MURNI								
01	RM								
01	PELAYANAN UMUM								
01	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI								
01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP								
3670	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis BPKP								
994	Layanan Perkantoran								
51	BELANJA PEGAWAI								
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS								
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	6,033,492,000	7,813,294,000	7,812,661,100	7,812,661,100	0	7,812,661,100	99.99	632,900
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	84,000	110,000	108,505	108,505	(9,868)	98,637	89.67	11,363
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	437,123,000	561,800,000	561,178,130	561,178,130	0	561,178,130	99.89	621,870
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	137,026,000	170,856,000	168,480,444	168,480,444	0	168,480,444	98.61	2,377,566
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	79,690,000	86,820,000	85,820,000	85,820,000	0	85,820,000	98.85	1,000,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	770,900,000	1,030,190,000	1,021,490,000	1,021,490,000	(800,000)	1,020,690,000	99.08	9,500,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	100,614,000	57,300,000	56,814,907	56,814,907	0	56,814,907	98.15	485,093
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	316,282,000	335,887,000	334,190,700	334,190,700	0	334,190,700	98.49	1,696,300
511129	Belanja Uang Makan PNS	947,988,000	802,860,000	788,066,000	788,066,000	0	788,066,000	98.16	14,794,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	72,020,000	66,900,000	65,905,000	65,905,000	(185,000)	65,720,000	96.24	1,180,000

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
TAHUN 2019
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 089 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)
 ESELON I : 01 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
 WILAYAH/PROVINSI : 0400 DI YOGYAKARTA
 SATUAN KERJA : 450536 PERWAKILAN BPKP D.I. YOGYAKARTA
 JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DAERAH

Kode Lap. : LRBST 01
 Tanggal : Rabu, 22 April 2020
 Halaman : 5
 Prog.id : lu_lrabstkt

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				TAHUN INI	JUMLAH S/D TAHUN INI	PENGEMBALIAN S/D TAHUN INI	JUMLAH NETO S/D TAHUN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	214,000,000	660,730,000	641,694,300	641,694,300	0	641,694,300	97.12	19,035,700
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	214,000,000	660,730,000	641,694,300	641,694,300	0	641,694,300	97.12	19,035,700
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	214,000,000	660,730,000	641,694,300	641,694,300	0	641,694,300	97.12	19,035,700
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 3678.951	214,000,000	660,730,000	641,694,300	641,694,300	0	641,694,300	97.12	19,035,700
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN 3678	214,000,000	660,730,000	641,694,300	641,694,300	0	641,694,300	97.12	19,035,700
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 01.01.01	25,799,280,000	27,968,146,000	27,841,939,624	27,841,939,624	(994,868)	27,840,944,756	99.55	127,201,244
06	Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional Serta Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah								
3701	Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional Serta Pembinaan Penyelenggaraan SPIP								
001	Hasil Pengawasan Proyek Strategis dan Prioritas Presiden Perwakilan BPKP								
52	BELANJA BARANG								
5212	Belanja Barang Non Operasional	6,720,000	6,720,000	6,675,500	6,675,500	0	6,675,500	99.34	44,500
521211	Belanja Bahan	6,720,000	6,720,000	6,675,500	6,675,500	0	6,675,500	99.34	44,500
5218	Belanja Barang Persediaan								
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	25,200,000	25,200,000	25,032,600	25,032,600	0	25,032,600	99.34	167,400
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	25,200,000	25,200,000	25,032,600	25,032,600	0	25,032,600	99.34	167,400
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri								
524111	Belanja Perjalanan Biasa	506,544,000	506,544,000	504,678,744	504,678,744	0	504,678,744	99.63	1,865,256
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	33,000,000	33,000,000	30,880,000	30,880,000	(625,000)	30,255,000	91.68	2,745,000

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
TAHUN 2019
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 089
ESELON I : 01
WILAYAH/PROVINSI : 0400
SATUAN KERJA : 450536
JENIS SATUAN KERJA : KD

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
DI YOGYAKARTA
PERWAKILAN BPKP D.J. YOGYAKARTA
KANTOR DAERAH

Kode Lap. : LRBST 01
Tanggal : Rabu, 22 April 2020
Halaman : 6
Prog.id : lu_lrabstkt

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA					% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				TAHUN INI	JUMLAH S/D TAHUN INI	PENGEMBALIAN S/D TAHUN INI	JUMLAH NETO S/D TAHUN INI	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	539,544,000	539,544,000	535,558,744	535,558,744	(625,000)	534,933,744	99.26	4,610,256	
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	571,464,000	571,464,000	567,266,844	567,266,844	(625,000)	566,641,844	99.27	4,822,156	
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 3701.001	571,464,000	571,464,000	567,266,844	567,266,844	(625,000)	566,641,844	99.27	4,822,156	
002	Hasil Pengawasan Pembangunan Prioritas Nasional Perwakilan BPKP									
52	BELANJA BARANG									
5212	Belanja Barang Non Operasional									
521211	Belanja Bahan	17,220,000	178,530,000	115,066,720	115,066,720	0	115,066,720	64.45	63,463,280	
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	17,220,000	178,530,000	115,066,720	115,066,720	0	115,066,720	64.45	63,463,280	
5218	Belanja Barang Persediaan									
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	57,400,000	57,400,000	57,271,000	57,271,000	0	57,271,000	99.78	129,000	
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	57,400,000	57,400,000	57,271,000	57,271,000	0	57,271,000	99.78	129,000	
5221	Belanja Jasa									
522141	Belanja Sewa	0	88,000,000	8,470,000	8,470,000	0	8,470,000	9.63	79,530,000	
522151	Belanja Jasa Profesi	0	5,620,000	0	0	0	0	0.00	5,620,000	
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	0	93,620,000	8,470,000	8,470,000	0	8,470,000	9.05	85,150,000	
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri									
524111	Belanja Perjalanan Biasa	1,146,048,000	2,322,676,000	2,199,065,138	2,199,065,138	(761,000)	2,198,304,138	94.65	124,371,862	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	81,000,000	188,482,000	163,040,000	163,040,000	(125,000)	162,915,000	86.44	25,567,000	
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	70,820,000	16,400,000	16,400,000	0	16,400,000	23.16	54,420,000	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	266,080,000	186,750,000	186,750,000	0	186,750,000	70.19	79,330,000	
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	1,227,048,000	2,848,058,000	2,565,255,138	2,565,255,138	(866,000)	2,564,389,138	90.07	283,668,862	

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
TAHUN 2019
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 089 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)
 ESELON I : 01 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
 WILAYAH/PROVINSI : 0400 DI YOGYAKARTA
 SATUAN KERJA : 450536 PERWAKILAN BPKP D.J. YOGYAKARTA
 JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DAERAH

Kode Lap. : LRBST 01
 Tanggal : Rabu, 22 April 2020
 Halaman : 8
 Prog.Id : lu_lrbstkt

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA					% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				TAHUN INI	JUMLAH S/D TAHUN INI	PENGEMBALIAN S/D TAHUN INI	JUMLAH NETO S/D TAHUN INI			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	15,400,000	15,400,000	15,370,000	15,370,000	0	15,370,000	99.81	30,000	
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	15,400,000	15,400,000	15,370,000	15,370,000	0	15,370,000	99.81	30,000	
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri									
524111	Belanja Perjalanan Biasa	262,608,000	361,233,000	342,309,882	342,309,882	0	342,309,882	94.76	18,923,118	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	66,600,000	18,600,000	17,030,000	17,030,000	0	17,030,000	91.56	1,570,000	
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	329,208,000	379,833,000	359,339,882	359,339,882	0	359,339,882	94.60	20,493,118	
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	349,228,000	399,853,000	379,260,002	379,260,002	0	379,260,002	94.85	20,592,998	
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 3701.004	349,228,000	399,853,000	379,260,002	379,260,002	0	379,260,002	94.85	20,592,998	
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN 3701	2,650,958,000	4,685,023,000	4,212,759,034	4,212,759,034	(1,886,000)	4,210,873,034	89.92	474,149,966	
3701	Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional Serta Pembinaan Penyelenggaraan SPIP									
011	Hasil Pembinaan penerapan SIMDA integrasi Perwakilan BPKP									
52	BELANJA BARANG									
5212	Belanja Barang Non Operasional	1,260,000	1,260,000	1,248,000	1,248,000	0	1,248,000	99.05	12,000	
521211	Belanja Bahan	1,260,000	1,260,000	1,248,000	1,248,000	0	1,248,000	99.05	12,000	
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	1,260,000	1,260,000	1,248,000	1,248,000	0	1,248,000	99.05	12,000	
5218	Belanja Barang Persediaan									
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	4,200,000	4,200,000	4,200,000	4,200,000	0	4,200,000	100.00	0	
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	4,200,000	4,200,000	4,200,000	4,200,000	0	4,200,000	100.00	0	
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri									
524111	Belanja Perjalanan Biasa	191,238,000	193,736,000	192,733,082	192,733,082	0	192,733,082	99.48	1,004,918	

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
TAHUN 2019
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 089 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)
 ESELON I : 01 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
 WILAYAH/PROVINSI : 0400 DI YOGYAKARTA
 SATUAN KERJA : 450536 PERWAKILAN BPKP D.J.I. YOGYAKARTA
 JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DAERAH

Kode Lap. : LRBST 01
 Tanggal : Rabu, 22 April 2020
 Halaman : 9
 Prog.id : lu_lrabstkt

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA					% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				TAHUN INI	JUMLAH S/D TAHUN INI	PENGEMBALAN S/D TAHUN INI	JUMLAH NETO S/D TAHUN INI	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,000,000	500,000	0	0	0	0	0.00	500,000	
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	194,238,000	194,238,000	192,733,082	192,733,082	0	192,733,082	99.23	1,504,918	
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	199,698,000	199,698,000	198,181,082	198,181,082	0	198,181,082	99.24	1,516,918	
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 3701.011	199,698,000	199,698,000	198,181,082	198,181,082	0	198,181,082	99.24	1,516,918	
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN 3701	199,698,000	199,698,000	198,181,082	198,181,082	0	198,181,082	99.24	1,516,918	
3701	Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional Serta Pembinaan Penyelenggaraan SPIP									
021	Hasil pengawasan dana desa Perwakilan BPKP									
52	BELANJA BARANG									
5212	Belanja Barang Non Operasional									
521211	Belanja Bahan	3,360,000	3,360,000	3,350,000	3,350,000	0	3,350,000	99.70	10,000	
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	3,360,000	3,360,000	3,350,000	3,350,000	0	3,350,000	99.70	10,000	
5218	Belanja Barang Persediaan									
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	11,200,000	11,200,000	11,197,500	11,197,500	0	11,197,500	99.98	2,500	
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	11,200,000	11,200,000	11,197,500	11,197,500	0	11,197,500	99.98	2,500	
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri									
524111	Belanja Perjalanan Biasa	386,551,330	387,464,000	386,551,330	386,551,330	0	386,551,330	99.76	912,670	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9,000,000	6,600,000	6,535,000	6,535,000	0	6,535,000	99.02	65,000	
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	394,064,000	394,064,000	393,086,330	393,086,330	0	393,086,330	99.75	977,670	
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	408,624,000	408,624,000	407,633,830	407,633,830	0	407,633,830	99.76	990,170	
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 3701.021	408,624,000	408,624,000	407,633,830	407,633,830	0	407,633,830	99.76	990,170	
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN 3701	408,624,000	408,624,000	407,633,830	407,633,830	0	407,633,830	99.76	990,170	

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
TAHUN 2019
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 089 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)
ESELON I : 01 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
WILAYAH/PROPINSI : 0400 DI YOGYAKARTA
SATUAN KERJA : 450536 PERWAKILAN BPKP D.J. YOGYAKARTA
JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DAERAH

Kode Lap. : LRBST 01
Tanggal : Rabu, 22 April 2020
Halaman : 10
Prog.id : lu_lrbstkt

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	TAHUN INI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
					JUMLAH S/D TAHUN INI	PENGEMBALIAN S/D TAHUN INI	JUMLAH NETO S/D TAHUN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3701	Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional Serta Pembinaan Penyelenggaraan SPIP								
031	Hasil pengawasan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Pemilu Tahun 2019								
52	BELANJA BARANG								
5212	Belanja Barang Non Operasional	1,260,000	1,260,000	1,257,000	1,257,000	0	1,257,000	99.76	3,000
521211	Belanja Bahan	1,260,000	1,260,000	1,257,000	1,257,000	0	1,257,000	99.76	3,000
5218	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	1,260,000	1,260,000	1,257,000	1,257,000	0	1,257,000	99.76	3,000
521811	Belanja Barang Persediaan	4,200,000	4,200,000	4,180,000	4,180,000	0	4,180,000	99.52	20,000
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	4,200,000	4,200,000	4,180,000	4,180,000	0	4,180,000	99.52	20,000
5241	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	4,200,000	4,200,000	4,180,000	4,180,000	0	4,180,000	99.52	20,000
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri	327,270,000	140,485,000	139,773,508	139,773,508	0	139,773,508	99.49	711,492
524111	Belanja Perjalanan Biasa	6,000,000	8,300,000	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000	84.34	1,300,000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	333,270,000	148,785,000	146,773,508	146,773,508	0	146,773,508	98.65	2,011,492
524113	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	333,270,000	148,785,000	146,773,508	146,773,508	0	146,773,508	98.65	2,011,492
524113	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	338,730,000	154,245,000	152,210,508	152,210,508	0	152,210,508	98.68	2,034,492
524113	JUMLAH BELANJA OUTPUT 3701.031	338,730,000	154,245,000	152,210,508	152,210,508	0	152,210,508	98.68	2,034,492
524113	JUMLAH BELANJA KEGIATAN 3701	338,730,000	154,245,000	152,210,508	152,210,508	0	152,210,508	98.68	2,034,492
524113	JUMLAH BELANJA PROGRAM 01.01.06	3,598,010,000	5,447,590,000	4,970,784,454	4,970,784,454	(1,886,000)	4,968,898,454	91.25	478,691,546
524113	JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 01.01	29,397,290,000	33,415,736,000	32,812,724,078	32,812,724,078	(2,880,868)	32,809,843,210	98.20	605,892,790
524113	JUMLAH BELANJA FUNGSI 01	29,397,290,000	33,415,736,000	32,812,724,078	32,812,724,078	(2,880,868)	32,809,843,210	98.20	605,892,790

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
TAHUN 2019
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 089 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)
 ESELON I : 01 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
 WILAYAH/PROPINSI : 0400 DI YOGYAKARTA
 SATUAN KERJA : 450536 PERWAKILAN BPKP D.I. YOGYAKARTA
 JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DAERAH

Kode Lap. : LRBST 01
 Tanggal : Rabu, 22 April 2020
 Halaman : 11
 Prog.id : lu_lrabstkt

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA					% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				TAHUN INI	JUMLAH S/D TAHUN INI	PENGEMBALAN S/D TAHUN INI	JUMLAH NETO S/D TAHUN INI	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	JUMLAH BELANJA CARA PENARIKAN	0	33,415,736,000	32,812,724,078	32,812,724,078	(2,880,868)	32,809,843,210	98.20	605,892,790	
	JUMLAH BELANJA SUMBER DANA	01	33,415,736,000	32,812,724,078	32,812,724,078	(2,880,868)	32,809,843,210	98.20	605,892,790	
	JUMLAH BELANJA JENIS SATKER	KD	33,415,736,000	32,812,724,078	32,812,724,078	(2,880,868)	32,809,843,210	98.20	605,892,790	
	JUMLAH TRANSAKSI KAS		33,415,736,000	32,812,724,078	32,812,724,078	(2,880,868)	32,809,843,210	98.20	605,892,790	
	JUMLAH BELANJA (TRANSAKSI KAS DAN TRANSAKSI NON KAS		33,415,736,000	32,812,724,078	32,812,724,078	(2,880,868)	32,809,843,210	98.20	605,892,790	

**LAPORAN REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA
PENGEMBALIAN BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
TAHUN 2019
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 089
ESELON I : 01
WILAYAH/PROPINSI : 0400
SATUAN KERJA : 450536
JENIS SATUAN KERJA : KD

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
DI YOGYAKARTA
PERWAKILAN BPKP D.J. YOGYAKARTA
KANTOR DAERAH

Kode Lap. : LRBST 01
Tanggal : 22-04-20
Halaman : 1
Prog.id : lu_lrapbstkth

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH YANG LALU SEMESTER INI	JUMLAH S/D SEMESTER INI	JUMLAH S/D SEMESTER INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	TRANSAKSI KAS							
0	RUPIAH MURNI							
01	RM							
01	PELAYANAN UMUM							
01	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI							
01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP							
3670	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis BPKP							
994	Layanan Perkantoran							
51	PENGEMBALIAN BELANJA PEGAWAI							
5111	Pengembalian Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	0	8,774	1,094	9,868	0.00	0
511124	Pengembalian Belanja Tunj. Fungsional PNS	0	0	700,000	100,000	800,000	0.00	0
511151	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS	0	0	185,000	0	185,000	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN SUB KELOMPOK BELANJA 5111	0	0	893,774	101,094	994,868	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN KELOMPOK BELANJA 51	0	0	893,774	101,094	994,868	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA OUTPUT 3670 994	0	0	893,774	101,094	994,868	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA KEGIATAN 3670	0	0	893,774	101,094	994,868	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA PROGRAM 01.01.01	0	0	893,774	101,094	994,868	0.00	0
06	Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional Serta Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah							
3701	Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan							

**LAPORAN REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA
PENGEMBALIAN BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
TAHUN 2019
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 089 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)
 ESELON I : 01 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
 WILAYAH/PROPINSI : 0400 DI YOGYAKARTA
 SATUAN KERJA : 450536 PERWAKILAN BPKP D.I. YOGYAKARTA
 JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DAERAH

Kode Lap. : LRBST 01
 Tanggal : 22-04-20
 Halaman : 2
 Prog.id : lu_irapbstkth

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D SEMESTER YANG LALU	SEMESTER INI	JUMLAH S/D SEMESTER INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	Pembangunan Nasional Serta Pembinaan Penyelenggaraan SPIP							
52	Hasil Pengawasan Proyek Strategis dan Prioritas Presiden Perwakilan BPKP							
5241	PENGEMBALIAN BELANJA BARANG							
524113	Pengembalian Belanja Perjalanan Dalam Negeri	0	0	0	625,000	625,000	0.00	0
	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	0	0	625,000	625,000	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN SUB KELOMPOK BELANJA 5241	0	0	0	625,000	625,000	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN KELOMPOK BELANJA 52	0	0	0	625,000	625,000	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA OUTPUT 3701.001	0	0	0	625,000	625,000	0.00	0
002	Hasil Pengawasan Pembangunan Prioritas Nasional Perwakilan BPKP							
52	PENGEMBALIAN BELANJA BARANG							
5241	Pengembalian Belanja Perjalanan Dalam Negeri	0	0	0	761,000	761,000	0.00	0
524111	Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa	0	0	0	125,000	125,000	0.00	0
524113	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	0	0	886,000	886,000	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN SUB KELOMPOK BELANJA 5241	0	0	0	886,000	886,000	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN KELOMPOK BELANJA 52	0	0	0	886,000	886,000	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA OUTPUT 3701.002	0	0	0	886,000	886,000	0.00	0
003	hasil Pembinaan SPI/SPIP K/LP/K Perwakilan BPKP							
52	PENGEMBALIAN BELANJA BARANG							
5241	Pengembalian Belanja Perjalanan Dalam Negeri	0	0	0	375,000	375,000	0.00	0
524113	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	0	0	375,000	375,000	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN SUB KELOMPOK BELANJA 5241	0	0	0	375,000	375,000	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN KELOMPOK BELANJA 52	0	0	0	375,000	375,000	0.00	0

**LAPORAN REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA
PENGEMBALIAN BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
TAHUN 2019
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 089 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)
ESELON I : 01 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
WILAYAH/PROVINSI : 0400 DI YOGYAKARTA
SATUAN KERJA : 450536 PERWAKILAN BPKP D.I. YOGYAKARTA
JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DAERAH

Kode Lap. : LRBST 01
Tanggal : 22-04-20
Halaman : 3
Prog.Id : lu_irapbskikh

KODE	URAIAN	3	4	REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA			8	9
				ANGGARAN SETELAH REVISI	JUMILAH S/D SEMESTER YANG LALU	SEMESTER INI		
1	2			5	6	7		
	JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA OUTPUT 3701.003	0	0	0	375,000	375,000	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA KEGIATAN 3701	0	0	0	1,886,000	1,886,000	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA PROGRAM 01.01.06	0	0	0	1,886,000	1,886,000	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUB FUNGSI 01.01	0	0	893,774	1,987,094	2,880,868	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA FUNGSI 01	0	0	893,774	1,987,094	2,880,868	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA CARA PENARIKAN 0	0	0	893,774	1,987,094	2,880,868	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUMBER DANA 01	0	0	893,774	1,987,094	2,880,868	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA JENIS SATKER KD	0	0	893,774	1,987,094	2,880,868	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN TRANSAKSI KAS	0	0	893,774	1,987,094	2,880,868	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA (TRANSAKSI KAS DAN TRANSAKSI NON KAS	0	0	893,774	1,987,094	2,880,868	0.00	0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
UNTUK TAHUN 2019
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 089 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)
ESELON I : 01 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
WILAYAH/PROPINSI : 0400 DI YOGYAKARTA
SATUAN KERJA : 450536 PERWAKILAN BPKP D.I. YOGYAKARTA
JENIS SATKER : KD KANTOR DAERAH

KD. LAPORAN : LRPS.T01
TANGGAL : 22/04/20
HAL : 1
PROG. ID : lu_pendsatf

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN				% REAL. PEND
			TAHUN INI	JUMLAH SAMPAI DENGAN TAHUN INI	PENGEMBALIAN SAMPAI DENGAN TAHUN INI	JUMLAH NETTO SAMPAI DENGAN TAHUN INI	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	TRANSAKSI KAS						
42	Penerimaan Dalam Negeri						
425	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	33,765,376	33,765,376	0	33,765,376	0.00
4251	PENDAPATAN PNBP LAINNYA	0	33,765,376	33,765,376	0	33,765,376	0.00
42513	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	0	33,765,376	33,765,376	0	33,765,376	0.00
425131	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN						
	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan						
	Jumlah Penerimaan 42513						
	Jumlah Penerimaan 4251						
4259	Pendapatan Lain-Lain						
42591	Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu I						
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	570,000	570,000	0	570,000	0.00
	Jumlah Penerimaan 42591	0	570,000	570,000	0	570,000	0.00
42599	Pendapatan Lain-Lain II						
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	594	594	0	594	0.00
	Jumlah Penerimaan 42599	0	594	594	0	594	0.00
	Jumlah Penerimaan 4259	0	570,594	570,594	0	570,594	0.00
	Jumlah Penerimaan 425	0	34,335,970	34,335,970	0	34,335,970	0.00
	Jumlah Penerimaan 42	0	34,335,970	34,335,970	0	34,335,970	0.00
	Jumlah Penerimaan Dalam Negeri	0	34,335,970	34,335,970	0	34,335,970	0.00
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	0	34,335,970	34,335,970	0	34,335,970	0.00
	JUMLAH PENDAPATAN	0	34,335,970	34,335,970	0	34,335,970	0.00
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	0	34,335,970	34,335,970	0	34,335,970	0.00